

ANALISA

1978 — 7

Beberapa Segi PEMBANGUNAN NASIONAL



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

ANALISA



Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staff CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi : Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA, M. Hadi SOESASTRO,
Harry TJAN SILALAH dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka), untuk Mahasiswa Rp. 7.200,— sudah termasuk ongkos kirim.

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat,
Telepon 356532-5

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13
Jakarta Pusat, Telepon 349489

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

PENGANTAR PENERBIT	491
<i>Kirdi DIPOYUDO,</i> PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA — ARTI MATERIILNYA	493
<i>C.P.F. LUHULIMA,</i> TEMPAT-TEMPAT ILMU SOSIAL DAN KEMANU- SIAAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ILMU DAN TEKNOLOGI NASIONAL — SUATU PEMI- KIRAN	506
<i>J. PANGLAYKIM,</i> WIRASWASTA (ENTREPRENEUR) DAN PERUSA- HAAN-PERUSAHAAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN SEBAGAI FAKTOR PERTUM- BUHAN EKONOMI NASIONAL	527
<i>O. Sutomo ROESNADI,</i> PENGARUH LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH PEMBANGUNAN DI DA- LAM NEGERI	556
DAFTAR PUBLIKASI CSIS	570

PENGANTAR REDAKSI

Pembangunan sebagai usaha untuk memperbaiki nasib bangsa dan meningkatkan taraf hidupnya membutuhkan kesungguhan untuk merealisasi nilai-nilai yang menjadi cita-cita bangsa pada pelbagai bidang kehidupannya seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam. Untuk ini asas-asas yang mungkin masih serba potensiil itu perlu digali secara terus menerus sejalan dengan kemampuan kita, khususnya kondisi ilmu dan teknologi, agar lambat laun asas-asas yang tersirat dapat menjadi lebih operasional dalam kehidupan nyata. Paling tidak dapat menjadi pedoman dan pegangan, tidak saja bagi para penyelenggara negara akan tetapi juga bagi seluruh masyarakat, termasuk dan terutama kalangan wiraswasta. Dengan demikian bidang-bidang kehidupan seperti tersebut di atas akan semakin merupakan unit-unit yang fungsional yang akan membentuk saling hubungan fungsional yang terpadu dalam kesatuan bangsa Indonesia sebagai unit fungsional yang lebih luas. Pada gilirannya kadar fungsionalitas bangsa yang semakin meningkat itu akan ikut menciptakan hubungan yang lebih seimbang dengan lingkungan luar negeri baik regional maupun internasional.

Dalam rangka itu ANALISA kali ini menampilkan empat karangan yang berusaha menyoroti berbagai dimensi pembangunan nasional Indonesia. Kirdi DIPOYUDO berusaha menggali arti materiil Moral Pancasila yang sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa merupakan landasan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Karangan ini dimaksud sebagai pelengkap karangan "Pancasila Moral Bangsa Indonesia. Suatu Pengantar", dalam ANALISA, Maret 1978, yang membahas arti formil Moral Pancasila. Dari sila masing-masing dijabarkan kewajiban-kewajiban moral yang lebih konkrit dan terperinci, agar Moral Pancasila menjadi lebih operasional dan lebih mudah diterapkan dalam pelbagai bidang kehidupan masyarakat dan negara.

Dalam karangan yang kedua C.P.F. LUHULIMA membahas tempat ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dalam pengembangan sistem ilmu dan teknologi nasional. Dalam hubungan itu juga dikemukakan pentingnya kerjasama antara kaum ilmiawan dan pemerintah dalam menghadapi dan memecahkan aneka masalah bangsa secara lebih bertanggung jawab. Soalnya ialah sejauh mana pengembangan ilmu, terutama ilmu-ilmu sosial, di negeri ini mampu memegang peranan yang lebih berarti guna menunjang pembangunan. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan ilmu yang bersumber pada kondisi sosial masyarakat bangsa, berorientasi kepadanya dan sekaligus berusaha memberikan arah yang lebih tepat kepada pembangunan nasional.

Dalam karangan yang ketiga J. PANGLAYKIM membahas soal wiraswasta (entrepreneur) dan perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan sebagai faktor pertumbuhan ekonomi nasional. Antara lain penulis ingin menonjolkan peranan vital golongan wiraswasta sebagai faktor yang menentukan dalam perekonomian nasional dan pembangunannya.

Akhirnya dalam karangan yang keempat O. Sutomo ROESNADI menguraikan pengaruh lingkungan internasional atas pembangunan nasional. Berdasarkan kenyataan bahwa hubungan antar bangsa tidak mungkin dapat dihindarkan lagi, penulis menandakan bahwa yang perlu bagi kita ialah bagaimana meningkatkan kemampuan kita sebagai bangsa agar hubungan dengan negara-negara lain itu dapat berlangsung secara seimbang sehingga saling menguntungkan secara adil.

Juli 1978

REDAKSI

PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA

- Arti Materiilnya

Kirdi DIPOYUDO

Seperti diuraikan dalam karangan lain,¹ Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara pada hakikatnya adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral dan dapat disebut Moral Bangsa Indonesia atau Moral Pancasila. Moral ini pertama-tama berlaku untuk orang Indonesia masing-masing, tetapi sebagai akibat penetapannya dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara juga berlaku bagi negara. Dengan demikian Moral Pancasila dapat dibedakan menjadi moral perorangan dan moral negara. Dalam karangan yang sama juga telah dibahas arti Pancasila sebagai Moral Bangsa Indonesia atau arti formilnya.

Untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, baik pelaksanaan obyektifnya dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun pelaksanaan subyektifnya dalam sikap dan tingkah laku orang masing-masing, kita tidak cukup mengetahui arti formilnya melainkan harus juga menyelidiki arti sila masing-masing atau arti materiilnya. Dalam karangan ini kita akan berusaha melakukannya dengan menjabarkan dari sila masing-masing kewajiban-kewajiban moral yang tersirat, baik bagi masing-masing warga bangsa Indonesia maupun bagi Negara Indonesia. Sebagai penutup akan dikemukakan, bahwa sebagai moral negara Moral Pancasila mengatur seluruh kehidupan

1 Kirdi Dipoyudo, "Pancasila Moral Bangsa Indonesia. Suatu Pengantar", *Analisa*, Maret 1978, hal. 203-214

negara dan harus dilaksanakan dalam segala bidangnya. Lagi pula akan disimpulkan bahwa Moral Pancasila adalah bagian inti kebudayaan Indonesia dan merupakan landasan pengembangannya.

I. PANCASILA SEBAGAI MORAL PERORANGAN

Sebagai moral perorangan yang berlaku bagi warganegara masing-masing dan mewajibkannya dalam tingkah lakunya, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban seperti berikut

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- Mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam hati dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku susila sehari-hari
- Menghormati kemerdekaan beragama dan beribadah orang dan umat lain sesuai dengan agama atau kepercayaannya (toleransi positif)
- Menghormati agama lain dan pemeluk agama lain
- Membina kerukunan agama
- Melaksanakan sila-sila lain dan menjalankan tugas sehari-hari sebagai bakti terhadap Tuhan.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Mengakui dan memperlakukan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin, agama dan kedudukan, sebagai manusia, yang dikurniai martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi (atau menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi sesama manusia)
- Memperlakukan sesama manusia seperti diri sendiri (tepa selira)

1 Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 54-57

- Tidak sewenang-wenang, menindas, memeras dan merampas hak-hak sesama manusia
- Menolak perbudakan, kolonialisme, rasialisme, politik apartheid, kediktatoran dan segala macam diskriminasi
- Menghormati bangsa-bangsa lain dan hak-hak mereka
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional

3. Persatuan Indonesia

- Membina kesadaran dan kebanggaan nasional Indonesia
- Menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia
- Ikut membela kemerdekaan, kedaulatan, keutuhan wilayah, keamanan dan kesejahteraan Indonesia
- Ikut memajukan persatuan bangsa dan proses integrasi
- Solider terhadap sesama warganegara
- Menjunjung tinggi dan ikut mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, termasuk bahasanya
- Menghormati hak-hak daerah dan kelompok-kelompok yang sah sesuai dengan asas bhinneka tunggal ika
- Menolak segala bentuk diskriminasi dan penyakit-penyakit sosial seperti korupsi, pemerasan dan sebagainya yang dapat membahayakan persatuan bangsa
- Melawan gerakan-gerakan yang membahayakan negara.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

- Menyadari diri sebagai warga negara dan ikut bertanggung jawab atas keselamatan negara dan pelaksanaan tugas-tugasnya memajukan kesejahteraan umum
- Menerima orang lain sebagai sesama warga negara dengan persamaan hak dan kewajiban
- Menghormati keyakinan dan pendapat sesama biarpun tidak menyetujuinya.
- Ikut dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan

semua sesama warganegara atas dasar persamaan hak dan tanggung jawab atas kesejahteraan bersama

- Ikut dalam pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk MPR, DPR dan DPRD
- Lewat MPR ikut menentukan GBHN
- Lewat DPR ikut mengawasi pelaksanaan GBHN, menetapkan anggaran negara dan mengawasi Pemerintah
- Mematuhi hukum sebagai keputusan bersama, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan undang-undang.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memperhatikan kesejahteraan umum yang menjadi urusan negara dan memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan dan kedudukan masing-masing demi terwujudnya kesejahteraan umum itu
- Mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang khusus ditetapkan untuk kesejahteraan umum
- Membayar pajak secara jujur
- Dalam menggunakan hak milik pribadi memperhatikan fungsi sosial
- Ikut memperjuangkan agar semua warganegara, terutama yang lemah kedudukannya, dapat ikut dalam perekonomian dan mendapatkan bagian yang wajar dari kekayaan dan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga masing-masing
- Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesejahteraan umum seperti menentukan harga-harga semau gue, menekan gaji dan upah semau-maunya, korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan sedikit orang tetapi merugikan secara tak adil rakyat banyak.

Dengan demikian Moral Pancasila sebagai moral perorangan mengatur sikap dan tingkah laku orang masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (sila pertama), terhadap sesama manusia di manapun dia berada (sila kedua), terhadap tanah air, nusa dan bangsa Indonesia (sila ketiga), terhadap negara Indo-

nesia dalam bidang politik dan pemerintahan (sila keempat), dan terhadap negara Indonesia dalam bidang-bidang ekonomi dan sosial (sila kelima). Dalam hubungan ini harus diperhatikan, bahwa sila-sila itu dapat dibedakan satu sama lain tetapi tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan bulat di mana kelima sila itu saling melengkapi dan saling membatasi. "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertenangan," demikian Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.¹

II. PANCASILA SEBAGAI MORAL NEGARA

Sebagai moral yang berlaku bagi negara dan dalam rangka pelaksanaannya harus dituangkan dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, Pancasila mengandung kewajiban-kewajiban negara seperti berikut.²

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (UUD 29/2)
- Membantu hidup keagamaan rakyat dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan melarang propaganda anti agama
- Mengarahkan pendidikan agama pada hidup keagamaan yang dewasa

1 Dikutip dari Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 11

2 Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 150-156

- Membina toleransi positif antar umat beragama/berkepercayaan
- Memajukan kerukunan antar umat beragama/berkepercayaan
- Menghormati semua agama dan kepercayaan dan memperlakukannya secara sama, lagi pula menghormati otonomi masing-masing dan tidak mencampuri urusan intern agama/kepercayaan
- Menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- Memberantas gejala-gejala hidup keagamaan yang kurang sehat seperti fanatisme, takhyul, magi dan usaha mengadu domba antar agama

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

- Mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang sebagai manusia, subyek martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi
- Memungkinkan semua warganya menikmati hak-hak asasinya secara aman, menunaikan kewajiban-kewajiban asasinya dengan baik, mengembangkan dirinya sebaik mungkin, dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sesempurna mungkin.
- Menjamin agar semua orang diperlakukan secara adil dan beradab dengan menetapkan undang-undang yang tepat dan melaksanakannya dengan baik (the rule of law)
- Memperlakukan semua bangsa dan negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik
- Mencegah dan menindak tindakan-tindakan yang melanggar martabat dan hak-hak asasi manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, mutilasi (mencincang), perbudakan, penindasan, kesewenang-wenangan, pemerasan, kekerasan, perlakuan feodal dan sebagainya
- Ikut mengakhiri kolonialisme dan imperialisme
- Mendukung gerakan-gerakan pembebasan nasional

3. **Persatuan Indonesia**

- Membela dan mengembangkan Indonesia sebagai satu Negara nasional yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur
- Meneruskan karya nation-building dengan meningkatkan persatuan, integrasi, asimilasi, kerukunan, dan kerjasama, tanpa menghapus perbedaan-perbedaan dan ciri-ciri daerah dan kelompok yang sah
- Menjunjung tinggi asas bhinneka tunggal ika
- Menolak sukuisme, daerahisme dan separatisme dan segala pertentangan antar suku dan antar daerah
- Menjunjung tinggi dan mengembangkan kebudayaan serta kepribadian nasional Indonesia
- Memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional
- Menolak baik isolasionisme maupun kolonialisme, imperialisme, ekspansionisme dan kosmopolitisme yang tidak menghargai nilai-nilai nasional
- Menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, manfaat bersama dan sikap saling menghormati, demi terwujudnya dunia baru yang lebih baik.

4. **Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan/perwakilan**

- Mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
- Mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakilnya untuk MPR, DPR dan DPRD secara bebas dan rahasia
- Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugas nasional, khususnya dengan menjamin agar rakyat lewat MPR ikut menentukan GBHN dan lewat DPR ikut melaksanakannya dalam undang-undang serta ikut mengawasi pelaksanaannya oleh Pemerintah dan aparaturnya
- Mendengarkan suara rakyat dan memperhatikannya
- Melayani kepentingan-kepentingan rakyat dan membina pegawai negeri sebagai pelayan rakyat (public servants)

- Berfungsi sebagai negara hukum (mengakui kedaulatan hukum)
- Menegakkan hukum sebagai ungkapan kehendak rakyat, termasuk Pancasila, UUD 1945, GBHN dan undang-undang
- Mengusahakan agar lembaga-lembaga negara berfungsi dengan baik dan menjalin hubungan fungsional satu sama lain
- Menjamin "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya" (UUD 28).

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

- Memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat
- Membagi beban dan manfaat, khususnya kekayaan dan pendapatan negara, kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu mereka yang lemah guna menjamin adanya keadilan
- Mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, dan dalam pembangunan (penyebaran pembangunan)
- Menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (UUD 33/1)
- Menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (UUD 33/2)
- Menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan menggunakannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UUD 33/3)
- Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar (UUD 34)
- Melaksanakan sistem pajak progresif
- Mengurangi jurang kaya miskin
- Mengakui hak milik perorangan sambil menandaskan fungsi sosial pemakaiannya

- Mengatur konsumsi sesuai dengan kemampuan ekonomi nasional dan mengatur iklan-iklan
- Mengusahakan produksi bahan-bahan pokok secara melimpah
- Menjamin pembangunan perumahan rakyat yang murah dan sehat dalam jumlah yang mencukupi
- Mengusahakan agar tiap-tiap warga negara mendapat pendidikan
- Meningkatkan penghasilan kelompok-kelompok yang sangat rendah pendapatannya
- Dengan prioritas utama memperluas kesempatan kerja sehingga setiap orang yang mampu dapat bekerja secara produktif penuh, sebanyak mungkin sesuai dengan keinginan dan kecakapan masing-masing
- Menciptakan suatu sistem penggajian yang seimbang baik secara horisontal antar sektor-sektor maupun secara vertikal untuk mencegah perbedaan-perbedaan yang menyolok
- Menciptakan suatu sistem harga barang-barang dan jasa-jasa yang seimbang untuk memungkinkan semua warganegara, khususnya yang lemah kedudukannya, hidup secara layak, dan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok kecil dan perbedaan-perbedaan yang menyolok (menghapus sistem liberal yang berlaku selama ini)
- Mengusahakan adanya keseimbangan antara penghasilan dan biaya hidup
- Mengusahakan jaminan-jaminan sosial bagi seluruh rakyat dengan mendirikan atau memajukan asuransi-asuransi dan dana-dana
- Menggalakkan penyebaran saham-saham perusahaan-perusahaan yang bonafide di kalangan rakyat banyak tidak hanya untuk mengumpulkan dana pembangunan tetapi juga untuk mendorong rakyat agar menabung dan mengadakan jaminan-jaminan
- Memajukan gerakan koperasi sebagai alat untuk membangun ekonomi rakyat yang lemah dan meratakan kemakmuran
- Pendek kata, keadilan sosial mewajibkan negara untuk

menyusun suatu masyarakat di mana semua golongan dan lapisan masyarakat secara aktif ikut dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan secara demikian ikut menikmati kemakmuran

Dengan demikian sila pertama Pancasila mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara serta bangsa lain, sila ketiga kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan satu kesatuan yang bulat.

III. PENERAPAN MORAL PANCASILA

Uraian di atas barulah suatu usaha untuk merumuskan sila masing-masing dari Pancasila secara singkat. Dalam rangka pelaksanaannya baik secara obyektif dalam peraturan-peraturan perundangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah maupun secara subyektif dalam sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing, sila-sila itu perlu dijabarkan lebih lanjut dan diterapkan dalam berbagai situasi dan bidang kehidupan negara, agar moral Pancasila benar-benar operasional sebagai norma atau pedoman baik bagi negara, termasuk lembaga-lembaga negara, maupun bagi perorangan. Kita akan berusaha melakukannya dalam karangan-karangan lain yang akan menyusul.

Dalam karangan ini kita membatasi diri dan kiranya cukup menandakan bahwa sebagai moral negara, Pancasila mengatur seluruh kehidupan negara dan harus menjadi jiwa bidang-bidang politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan dan keamanan pertahanan. Norma-norma yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Peraturan-peraturan perundangan yang mengaturnya tidak hanya tidak

boleh bertentangan dengan norma-norma itu, melainkan juga harus selaras dengan itu dan sebanyak mungkin merupakan penguatan atau pelaksanaan obyektifnya. Dengan perkataan lain, dalam rangka pelaksanaan Pancasila harus disusun dan dijalankan politik Pancasila baik dalam maupun luar negeri, sistem ekonomi Pancasila, sistem pendidikan Pancasila, sistem jaminan-jaminan sosial Pancasila, sistem perburuhan Pancasila, sistem perpajakan Pancasila dan lain sebagainya. Dengan maksud itu harus disusun sistem hukum nasional atas dasar Pancasila untuk menggantikan sistem hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang tidak hanya banyak ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi Negara, yang berlaku sampai sekarang.

Yang lebih penting lagi, sistem hukum nasional serupa itu harus dilaksanakan dengan baik. Negara tidak hanya wajib menyusunnya, tetapi terutama juga menjamin pelaksanaannya secara efektif, karena betapa baiknyapun dia tidak berguna kalau tidak dilaksanakan. Tetapi justru di sinilah salah satu masalah pokok kita. Banyak peraturan perundangan tetap tinggal di atas kertas dan tidak dilaksanakan dengan baik. Apa yang terjadi kerap kali bertolak belakang dengan peraturan-peraturan itu. Dan salah satu jaminan pelaksanaan yang penting ialah adanya pengawasan yang saksama, akan tetapi di sini terdapat pokok kelemahan kita lain. Mekanisme pengawasan kita, baik yang intern maupun ekstern, kurang berfungsi. Oleh sebab itu sistem "checks and balances" antara lembaga-lembaga negara yang tinggi, seperti diatur dalam UUD 1945, perlu dikembangkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Khususnya DPR dan dalam bidang keuangan juga BPK perlu meningkatkan kegiatannya mengawasi pelaksanaan UUD 1945 dan peraturan-peraturan perundangan bawahan. Demikianpun inspektorat-inspektorat jenderal dalam departemen-departemen, pemimpin di setiap tingkatan aparatur pemerintah, dan pers kita.

Moral Pancasila adalah bagian inti kebudayaan nasional Indonesia. Sila-silanya bukanlah semata-mata salah satu bagian di samping bagian-bagiannya yang lain, tetapi bagian yang menjiwai dan mengarahkan seluruh kegiatan manusia dan negara pada tujuannya. Dengan demikian moral Pancasila adalah

juga dasar atau landasan pengembangan kebudayaan nasional Indonesia. Pertama-tama hal itu berarti bahwa moral Pancasila menjadi pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang kita gunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan kita. Unsur-unsur dalam masyarakat kita yang bertentangan dengannya harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan. Hal itu tidak hanya berlaku bagi kebudayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga bagi kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan-kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya atau mengembangkan kebudayaan kita serta mempertinggi martabat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambil-alihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan Pancasila. Kita memerlukan unsur-unsur yang positif itu untuk pembaruan dalam proses pembangunan nasional kita. "Pembaharuan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern," demikian Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, moral Pancasila menjadi pedoman pengarah pengembangan kebudayaan kita agar kebudayaan nasional Indonesia benar-benar dapat memainkan perannya yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh pembangunan bangsa kita. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan adalah panglima pembangunan nasional kita. Agar berhasil pembangunan nasional ini harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara baik dalam bidang-bidang tersebut. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi masyarakat manusiawi (*humane society*), sasaran pokok seluruh pembangunan nasional. Berkat adanya masyarakat serupa itu, setiap

warga masyarakat kita akan dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan selengkap mungkin. Moral Pancasila menempatkan manusia Indonesia sebagai pelaku dan tujuan pembangunan nasional.

TEMPAT ILMU-ILMU SOSIAL DAN KEMANUSIAAN DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ILMU DAN TEKNOLOGI NASIONAL – SUATU PEMIKIRAN*

C.P.F. LUHULIMA

PENDAHULUAN

Pembahasan ini akan dimulai dengan mengemukakan secara singkat arti dan fungsi ilmu dan teknologi, yang kemudian disusul dengan pembahasan sistem ilmu dan teknologi yang menjadi dasar pembangunan kembali Eropa dan reaksi terhadap kelemahan-kelemahan dalam pertumbuhan ekonomi, yang meluas sejak tahun 1968/69. Uraian ini disusul dengan pengalihan sistem ilmu dan teknologi ini ke negara kita untuk mempertumbuhkan ekonomi kita sendiri dan kritik-kritik terhadap kekurangan-kekurangannya. Akhirnya ditunjukkan keharusan bagi kita untuk mengembangkan sistem ilmu dan teknologi kita sendiri, dan tempat-tempat ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan-nya di dalamnya, sehingga tahap-tahap pembangunan selanjutnya dapat lebih bergerak ke sasaran idiil bangsa kita.

ARTI DAN FUNGSI ILMU DAN TEKNOLOGI

Manusia adalah makhluk yang senantiasa berusaha untuk memahami alam sekelilingnya, lingkungan hidupnya. Dengan pengetahuan yang diperolehnya ia melanjutkan usahanya untuk menyelami kenyataan lebih dalam dan lebih tepat lagi, memahaminya lebih banyak dan lebih jauh lagi. Tidaklah pernah ia akan menerima kenyataan begitu saja, betapapun jauhnya sudah realitas itu dari jangkauan langsung pancainderanya dan betapapun kompleksnya sudah peralatan yang dibutuhkan untuk memperoleh pengetahuan itu.

* Pidato Dies Natalis Lemhanas XIII, tanggal 20 Mei 1978. Dimuat atas kebaikan Lemhanas.

Dua cara pendekatan dikembangkan orang-orang Eropa dalam usaha mereka menyelami dan memahami kenyataan, dalam memberi bentuk kepada pengetahuan mereka: melalui pendekatan "empiris-induktif" dan melalui pendekatan "teoritis-deduktif"¹ Pendekatan-pendekatan ini tidaklah ditujukan kepada kenyataan sebagai suatu kesatuan — itu adalah filsafat — melainkan kepada aspek-aspek kenyataan atau peristiwa-peristiwa yang dapat dirumuskan dan dipisah-pisahkan dengan jelas. Mereka tidak bertanya: "Apa itu kehidupan?" melainkan "Bagaimanakah darah mengalir dalam tubuh manusia?"; bukan "Bagaimana dunia diciptakan?" melainkan "Bagaimanakah planet-planet bergerak?". Pertanyaan-pertanyaan yang umum dihindarkan; perhatian lebih ditujukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbatas sifatnya, karena lebih mudah memperoleh jawaban-jawaban langsung dan tegas. Studi tentang benda-benda yang bergerak di angkasa raya menjurus ke mekanika angkasa dan pengertian tentang universalitas hukum gravitasi, sedangkan studi tentang friksi dan gas-gas menjurus kepada hukum-hukum termodinamika. Melalui pendekatan-pendekatan ini mereka menciptakan bentuk-bentuk pengetahuan yang merupakan cermin dari alam semesta, kerangka konsepsional untuk memahami alam lebih lanjut, atau dengan kata lain, suatu pandangan ilmiah dari dunia.

Teknologi ialah usaha yang sistematis untuk membuat cermin dari alam menjadi suatu kenyataan. Akan tetapi manusia dengan teknologi modernnya tidak hanya mengolah materi, melainkan menyingkapkan segala kemungkinan yang tersimpul di dalamnya. Dengan teknologi manusia menerobos, mengatasi keterbatasan materi, mengeksploitasinya sejauh mungkin. Melalui televisi, misalnya, manusia dapat mengatasi keterbatasan dari ruang di mana ia berada. Televisi itu memungkinkan mata manusia melihat apa yang terjadi di suatu tempat yang berjauhan, tanpa merubah jarak dari mata itu, tanpa merubah keterbatasan dan keterikatan dari mata. Demikian pulalah halnya dengan radio dan telpon. Jarak antara penyiar dan penerima, atau antara para pembicara tidak ditiadakan; jarak itu hanya dilalui dengan kecepatan yang sangat tinggi.

¹ James E. Conant, *Two Modes of Thought. My Encounters with Science and Education*, New York 1964

Melalui teknologi kita lalu mengenal dua bentuk kenyataan, yaitu realitas yang diciptakan Tuhan dan realitas yang diciptakan manusia. Kedua ciptaan ini tidak senantiasa hidup berdampingan secara damai. Sering sudah terjadi bahwa dunia yang diciptakan manusia mendesak, bahkan merusak dunia ciptaan Tuhan itu; akan tetapi tidak jarang pula ciptaan Tuhan menghancurkan kreasi manusia melalui bencana-bencana alam.

Ilmu dan teknologi yang diciptakan manusia untuk menjamin kelanjutan hidupnya, untuk membantunya merubah alam demi kepentingan dan pengembangan dirinya, dalam perkembangan lanjutnya, menempuh jalannya sendiri. Diciptakan sebagai alat untuk membantu memperbaiki hidupnya, menyenangkan dan membahagiakan manusia, ilmu dan teknologi kemudian mengingkari arti dan fungsinya semula dan mencari dan mengembangkan eksistensinya sendiri. Ilmu dan teknologi yang semula dipertumbuhkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan manusia, kini lebih cenderung untuk hanya menciptakan permintaan dalam hidup manusia saja, sehingga ia melahirkan suatu sikap hidup di negara-negara kaya untuk mengharapkan peningkatan hidup yang terus menerus dalam bentuk materi, suatu sikap yang telah menjalar pula ke tingkat-tingkat atas dan tengah atas dalam struktur masyarakat kita sendiri.

SISTEM ILMU DAN TEKNOLOGI SEJAK PERANG DUNIA II

Bentuk ilmu dan teknologi yang dibangun atas dasar jawaban-jawaban yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan itu tadi mendapat dorongan yang besar sekali pada waktu Perang Dunia II baru saja mulai; ia berkembang berkat kerja sama yang erat antara pemerintah dan para ilmiawan, terutama sekali ahli-ahli fisika di Inggris dan Amerika Serikat.

Di Amerika usaha Albert Einstein, bersama-sama dengan Enrico Fermi, seorang ahli fisika Italia, yang juga seperti Einstein menerima hadiah Nobel dan kemudian menetap di Amerika, dan George B. Pregram dari universitas Columbia, untuk meminta perhatian Amerika kepada arti potensiil dari hasil-hasil penelitian dasar, dilambangkan dengan surat Einstein

kepada presiden Franklin D. Roosevelt, tertanggal 2 Agustus 1939 untuk menyadarkan pemerintah akan potensi militer dari atom. Usaha ini diikuti dengan pemupukan kerja sama antara pemerintah dan para ahli fisika Inggris dari *Tube Alloys* dan yang diperluas di Amerika Serikat dengan diciptakannya *Manhattan Project*, yang menyerap 2 milyar dollar. Penelitian secara besar-besaran ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenangkan Perang Dunia II. Lahirlah istilah "penelitian perang" dan Perang Dunia II itu sendiri dipandang sebagai "pembauran simbolis dari ilmu dan perang."¹ Tetapi yang lebih penting lagi kiranya ialah bahwa Perang Dunia II melahirkan pula suatu organisasi baru, suatu wahana kerja sama antara pemerintah, para ahli fisika dan angkatan bersenjata, yang bertahan sesudah perang, ketika dunia memasuki Perang Dingin dan masa pertumbuhan ekonomi di wilayah Ero-Amerika.

Kepercayaan yang tinggi terhadap keberhasilan ilmu, terutama di negara-negara yang keluar sebagai pemenang utama Perang Dunia II, Amerika Serikat dan Inggris, mempengaruhi kebijaksanaan-kebijaksanaan ilmu dan teknologi sebagai bagian dari kebijaksanaan nasional dalam menghadapi Perang Dingin dan pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional. Ilmu fisika tetap merupakan dasar utama pengembangan ilmu secara keseluruhan dan pandangan serta gaya ahli fisika mempengaruhi lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi serta dewan-dewan kebijaksanaan nasional.

Di daratan Eropa-Barat perhatian sesudah perang terutama ditujukan kepada pembangunan kembali masyarakatnya yang mengalami kehancuran sebagai akibat dari perang itu. Tetapi di sini pula para ilmiawan dimobilisasi untuk menangani masa pembangunan kembali pada tingkat-tingkat eksekutif yang paling tinggi; di sini pula jenis "pemerintah semasa perang" memegang tampuk pimpinan negara. Karena konsep-konsep pembangunan Eropa berkisar pada sumbu pertumbuhan ekonomi, maka para ilmiawan yang dikerahkan untuk melaksanakan pembangunan kembali Eropa secara besar-besaran dengan ban-

1 Daniel Bell, *The Coming of Post-Industrial Society*, New York 1973, hal. 22

tuan Amerika Serikat yang dituangkan ke dalam Rencana Marshall -- yang menyerap kurang lebih 13 milyar dollar dalam jangka waktu empat tahun, dari 30 April 1948 sampai 30 Juni 1951 -- terdiri dari para ahli ekonomi, terutama pula ahli ekonometri, dan demografi, sebagaimana umpamanya, dapat kita lihat pada *Commissariat General au Plan*, Perancis, yang bertugas menyusun model-model perkiraan jangka panjang yang dibutuhkan bagi penyusunan keputusan-keputusan yang mengarahkan pertumbuhan ekonomi Perancis.

Pengarahan para ahli ekonomi dan demografi ini dipengaruhi oleh pola pengarahan ahli-ahli fisika, karena ilmu-ilmu ini bersendikan matematika dan menggarap proses-proses sosial yang lebih mudah didekati secara kuantitatif dan karena ilmu-ilmu ini berhasil mengembangkan suatu metodologi yang sangat maju dan berdekatan dengan metoda-metoda ilmu alam, maka keberhasilannya juga lebih mudah dapat diperkirakan.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat di wilayah Ero-Amerika sesudah perang dimungkinkan pula oleh faktor lain yang sangat menentukan, yaitu kebijaksanaan pemerintah untuk "membiaiyai, mendorong dan menyebarkan sumber daya ilmiah negara—peneliti-penelitinya yang terlatih, laboratorium dan peralatan -- untuk kepentingan kemakmuran nasional,"¹ sesuatu yang kini sudah lazim kita sebut kebijaksanaan ilmiah.

Dalam suatu suasana di mana pertimbangan-pertimbangan kuantitatif menguasai pemikiran-pemikiran pemerintah di negara-negara Ero-Amerika, maka ilmu-ilmu sosial lainnya hanya dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijaksanaan apabila ilmu-ilmu ini menggunakan pola-pola pemikiran yang sejenis, seperti indikator-indikator ekonomi dan demografi, ukuran GNP atau GDP, pengembangan model-model ekonometri dan teknik-teknik pengelolaan. Ilmu-ilmu sosial non-ekonomi lalu berperan sebagai peningkat kemampuan perencanaan, penyusun program-program pemerintah dan penyempurna administrasi. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa banyak orang di wilayah Ero-Amerika, baik yang berkecimpung di

1 *Fundamental Research and the Policies of Government*, OECD, Paris, 1966, hal. 16

bidang penelitian, maupun dalam bidang politik, mendapat kesan bahwa fungsi ilmu-ilmu sosial non-ekonomi itu hanyalah sebagai *social engineering*, yaitu merumuskan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan jawaban-jawaban teknis bagi masalah-masalah yang dilahirkan pertumbuhan itu. Di Jerman dan Perancis, misalnya, kegiatan-kegiatan dan hasil-hasil penelitian ilmu-ilmu sosial yang tidak kuantitatif sifatnya dianggap tidak relevan dengan usaha pembangunan kembali negara. Karena itu di kedua negara ini sebagian besar dari penelitian ilmu-ilmu sosial lalu memusatkan perhatiannya pada hal-hal dan masalah-masalah yang tidak langsung berkaitan dengan masalah-masalah nasional yang penting, yang dihadapi negara dan masyarakat.

Harapan-harapan yang diletakkan atas pundak ilmu-ilmu sosial non-ekonomi tidak terpenuhi. Peranan ilmu-ilmu sosial memang tidak terletak di situ, lebih dalam memperjelas masalah-masalah, memperjelas pemilihan dan mengusulkan alternatif-alternatif atau menunjukkan sasaran-sasaran yang sulit sekali atau tidak dapat dicapai. Ilmu-ilmu sosial sebagai suatu bidang penelitian hanya dapat merupakan suatu alat untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi, merumuskan dan mentes hipotesa-hipotesa, atau menyusun rencana-rencana bagi tindakan-tindakan sosial dan politik dengan memperhatikan hasil-hasil yang dicapai. Di sinilah letak fungsi dan tugas ilmu-ilmu sosial: "Ia membuka jalan, tetapi ia sendiri tidak akan dapat membangun jalan itu."¹

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN AKIBATNYA DI WILAYAH ERO-AMERIKA

Sistem ilmu dan teknologi modern inilah yang merupakan daya penggerak utama pertumbuhan ekonomi dengan ciri-cirinya yang sudah amat terkenal itu: meningkatnya produktivitas (*output* dibandingkan dengan *input*) dan penambahan penduduk yang sangat pesat; terjadinya perubahan-perubahan struktu-

1 J.J. Salomon, *Development of Social Sciences and Science Policy Studies in Europe*, New Delhi 1976, hal. 6-7

ril yang sangat menyolok (perpindahan penduduk dari sektor pertanian ke sektor industri) dan perubahan-perubahan institusional; terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam bidang pengangkutan dan komunikasi serta -- juga di negara-negara maju -- pertumbuhan yang tidak merata.

Sistem ilmu dan teknologi modern ini tidak saja merupakan penggerak utama dari pertumbuhan ekonomi, melainkan juga penggerak utama dari pertumbuhan organisasi-organisasi ekonomi raksasa, seperti perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional. Sistem ini merupakan penggerak utama pula dari pemusatan kekuasaan pemerintah di negara-negara industri maju, tidak saja untuk mengendalikan dan mengatur organisasi-organisasi raksasa itu tadi, melainkan karena ilmu dan teknologi modern telah menciptakan pula proses-proses dan produk-produk yang dapat membahayakan kehidupan manusia di wilayah-wilayah kekuasaannya.

Mulai tahun 1960 sasaran pertumbuhan ekonomi lebih ditingkatkan lagi di seluruh wilayah Ero-Amerika, walaupun ia tidak mendesak pertimbangan-pertimbangan keamanan nasional. Para *system-analysts* memperkuat barisan para ahli ekonomi dan demografi dalam usaha itu. Mobilisasi para *'system-analysts* ini memungkinkan pemerintah di negara-negara Ero-Amerika memperbesar dan menyempurnakan pengawasan atas dan pengelolaan dari sistem ekonomi. Mereka ikut mendorong perusahaan-perusahaan dalam satu cabang industri untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan bersama atas dasar kepentingan-kepentingan jangka panjang bagi tujuan perencanaan ekonomi nasional. Dan karena pemerintah mempunyai mekanisme yang peka bagi pengelolaan sistem ekonomi, maka baik pemerintah itu sendiri, maupun rakyat banyak di negara-negara Ero-Amerika memperkirakan bahwa pendapatan *per capita* akan naik setiap tahun. Perkiraan ini didasarkan atas meningkatnya kecepatan inovasi. Oleh sebab itu terus didirikanlah badan-badan baru dalam bidang penelitian dan pengembangan dan dalam bidang pendidikan dan latihan. Tujuan badan-badan penelitian dan pengembangan ialah mengurangi jangka waktu dari penciptaan suatu ide baru sampai kepada penerapannya dalam proses produksi, sedangkan tujuan badan-badan pendi-

dikan dan latihan ialah mengurangi kemacetan dalam produksi yang disebabkan oleh kelangkaan tenaga kerja yang trampil. Perkembangan ini menunjukkan adanya suatu pergeseran dari teknologi dan kesempatan kerja penuh ke inovasi dan pendidikan sebagai penggerak utama ekspansi lanjut ekonomi Ero-Amerika.

Perlombaan yang terjadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara ternyata melahirkan berbagai ketimpangan sosial pula. Mekanisme-mekanisme perencanaan tampaknya tidak mampu menghadapi akibat-akibat sosial dari perlombaan pertumbuhan ekonomi itu, karena baik metoda-metoda dan peralatan analisa, maupun teori ekonomi yang mendominasi pemikiran para ahli ekonomi tidak memperhitungkan perubahan-perubahan yang besar yang terjadi dalam perilaku manusia sebagai akibat dari pertumbuhan yang pesat itu. Penciptaan kompleks industri yang luar biasa hebatnya, yang disertai urbanisasi yang luar biasa pula, tidak hanya menghasilkan kekayaan materiil yang berlipat ganda, melainkan juga ketimpangan-ketimpangan antar daerah, antara pusat-pusat industri dan non-industri, antara kota dan desa, dan dalam jangkauan global, antara negara-negara kaya dan miskin. Distorsi-distorsi ini tampak pula pada ketimpangan-ketimpangan dalam eko-sistem dan kesulitan-kesulitan yang kian bertambah dalam usaha manusia Ero-Amerika untuk menyesuaikan diri dengan kecepatan perkembangan teknologi dan organisasi dan menghadapi tekanan-tekanan psikologis, kebudayaan dan sosial yang diakibatkan pertumbuhan itu.

”Pemerintah semasa perang” ini, markas besar para ahli ekonomi, ahli demografi dan *system-analysts*, yang begitu bersemangat mempertumbuhkan ekonomi dengan pesat, tidak memperhitungkan bahwa keberhasilan mereka tidak memenuhi kebutuhan kualitatif rakyat banyak yang justru dilahirkan keberhasilan itu sendiri. Perkembangan ini yang mulai sejak tahun-tahun 1968-1969 dan sama terjadinya dengan *detente* dan aksi-aksi mahasiswa serta fiasko Amerika di Vietnam, mempertumbuhkan kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi harus mempunyai tujuan sosial yang jelas, memerlukan suatu sistem nilai dan kriteria sebagai kerangka konseptuil sosial-budaya yang

mendasari pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan ekonomi.

Usaha-usaha ke arah itu dilakukan dengan mengembangkan suatu sistem statistik sosio-demografi yang bertujuan untuk lebih memahami persyaratan kesejahteraan yang tidak terlaksanakan melalui mekanisme pasar. Lagi pula, kesadaran akan keterbatasan ukuran GNP sebagai suatu bentuk ukuran yang memadai bagi distribusi pendapatan telah menjurus ke usaha-usaha untuk merumuskan "indikator-indikator sosial" yang dapat melengkapi pemerintah dengan peralatan yang lebih berimbang bagi perencanaan ekonomi. Bersamaan dengan hal ini tumbuhlah sejumlah penelitian ilmu-umu sosial yang dilakukan badan-badan pemerintah dan universitas tentang daerah-daerah permasalahan yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat itu, seperti perkembangan kota, masalah lingkungan, sistem pengangkutan, perbaikan administrasi, meningkatnya buruh asing, dengan komposisi pendekatan yang lebih interdisipliner sifatnya.

Akan tetapi mereka menyadari pula bahwa kurangnya tepat untuk menaruh harapan yang berlebihan terhadap kecenderungan mobilisasi ilmu-ilmu sosial non-ekonomi dalam menghadapi masalah-masalah sosial. Ilmu-ilmu sosial sendiri belum dapat melengkapi diri dengan pengertian-pengertian dan alat-alat analisa yang dapat dianggap mampu sudah untuk menghadapi masalah-masalah itu.

Untuk pertama kalinya setelah Perang Dunia II sistem ilmu dan teknologi yang dilahirkan perang itu mulai goyang sendi-sendinya. Para ilmuawan, terutama para ahli fisika, ahli ekonomi, ahli demografi dan ahli-ahli ilmu-ilmu yang sejenis, mulai kehilangan monopolinya di lingkungan pemerintah dan terutama di dalam masyarakat. Sistem ilmu dan teknologi yang bekerja "dari atas", yang sudah berhasil memenangkan perang dan kemudian mempertumbuhkan ekonomi secara menakjubkan justru melahirkan pula kekuatan-kekuatan sosial, yang mempertanyakan keberhasilan lanjut dari sistem itu. Dunia yang diciptakan manusia di samping dan di atas dunia yang diciptakan Tuhan telah menciptakan suatu realitas sampingan pula, yang mengandung unsur-unsur yang menentangnyanya sendiri.

Secara politis kesangsian terhadap sistem ilmu dan teknologi ini datang dari pihak kanan, kiri dan tengah dalam spektrum politik wilayah itu. Dari pihak kanan sistem ilmu dan teknologi ini dikecam sebagai pengisi waktu para ilmiawan saja, yang hanya memboroskan waktu dan uang, yang merugikan pertumbuhan lanjut industri, sedangkan pihak kiri melihat sistem ini sebagai alat dominasi kekuatan ekonomi dan militer yang tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang sudah sangat mendesak. Kelompok kiri juga melihat industri yang berteknologi tinggi sebagai sesuatu yang merugikan pemerataan pendapatan, sedangkan sistem ilmu dan teknologi itu sendiri sebagai suatu faktor yang anti-demokratis sifatnya, baik dalam struktur organisasinya, maupun dalam pengaturannya. Kelompok tengah, yang terdiri dari bagian terbesar di wilayah Ero-Amerika, lebih konstruktif sikapnya. Mereka menuntut agar supaya pendapat umum, persepsi dan aspirasi mereka, diintegrasikan ke dalam perumusan-perumusan kebijaksanaan ilmu dan teknologi, sehingga ia merupakan bagian integral dari kebijaksanaan sosial yang menyeluruh, lebih demokratis sifatnya dan menjurus ke pembentukan suatu sistem ilmu dan teknologi yang baru.

ILMU PENGETAHUAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

Lukisan singkat mengenai pertumbuhan sistem ilmu dan teknologi di wilayah Ero-Amerika sejak Perang Dunia II memperlihatkan bagaimana bentuk pembangunan kembali yang dipertumbuhkan atas sistem itu sejak permulaan dasawarsa 1970-an mengalami berbagai kesulitan, karena keberhasilan-keberhasilan kuantitatif menciptakan berbagai kebutuhan kualitatif yang tidak dapat ditunjukkan dan dipenuhi oleh mekanisme pasar, yang sejak pembangunan di Eropa dimulai merupakan indikator yang paling terpercaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lukisan singkat ini juga dimaksudkan untuk memperlihatkan beberapa kesejajaran dalam perkembangan yang terjadi di wilayah Ero-Amerika dengan yang terjadi di negara kita sendiri.

Sebagaimana halnya dengan pemerintah-pemerintah di wilayah Eropa Barat ketika menghadapi pembangunan kembali masyarakatnya dari kehancuran yang diakibatkan Perang Dunia II, maka di Indonesia pun pemerintah Orde Baru dalam menghadapi tugas pembangunan nasional memobilisasi para ahli ekonomi dan demografi. Pendidikan yang diperoleh sarjana-sarjana Indonesia di luar negeri, terutama di wilayah Ero-Amerika, menyebabkan bahwa pengetahuan mereka dibentuk pula atas dasar sistem ilmu dan teknologi yang telah dikembangkan di sana itu. Maka tidaklah mengherankan bahwa dasar pemikiran dalam kebijaksanaan pembangunan nasional kita berisikan pengalihan langsung dari bentuk-bentuk pengetahuan mutakhir wilayah Ero-Amerika, yang tidak sempat ditinjau dan dievaluasi kembali, sehingga hasil-hasil pembangunan yang sudah kita capai kini memperlihatkan perkembangan-perkembangan yang kurang lebih sama. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang telah dapat kita capai memperlihatkan pula peningkatan produktivitas, di samping peningkatan jumlah, komposisi dan penyebaran penduduk; terjadinya perubahan-perubahan struktural dan institusional; perubahan-perubahan dalam sarana pengangkutan dan komunikasi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi ini juga mempertajam berbagai ketimpangan; perbedaan-perbedaan yang menyolok antara yang kaya dan yang miskin; ketimpangan-ketimpangan antara kota dan desa, antara pusat dan daerah, antara Jawa dan daerah-daerah di luar Jawa, antara kehidupan modern dan tradisional, antara sektor pribumi dan non-pribumi.

Dalam memulai PELITA I para ahli ilmu-ilmu sosial non-ekonomi dan kemanusiaan Indonesia, yang juga memperoleh pendidikan mereka di wilayah Ero-Amerika, memang sudah menyuarakan kekhawatirannya bahwa perhatian terhadap bidang-bidang sosial-budaya dalam program pembangunan itu masih kurang dan bahwa ilmu-ilmu sosial non-ekonomi masih belum dimanfaatkan secukupnya dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan.

Pada lain pihak para ahli ilmu-ilmu sosial ini beranggapan bahwa ilmu-ilmu yang mereka pelajari masih belum mempunyai metodologi dan peralatan analisa yang cukup tangguh untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya bagi perumusan kebijaksanaan

pembangunan dan bahwa data yang dibutuhkan bagi perumusan kebijaksanaan itu masih sangat terbatas.

Tidaklah mengherankan bahwa sikap ahli-ahli ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan ini merupakan sebab utama mengapa para ahli ekonomi dan demografi sendirilah yang memegang peranan yang paling utama dalam perumusan dan pelaksanaan rencana-rencana pembangunan lima tahun kita. Walaupun para ahli ekonomi sadar pula bahwa perkembangan-perkembangan sosial-budaya di dalam masyarakat, sebagaimana halnya dengan perkembangan ekonomi juga, mempunyai dinamikanya sendiri, akan tetapi peralatan analisa dan metodologi mereka tidak peka untuk menangkap dan merekam perkembangan-perkembangan itu, sehingga masalah-masalah sosial yang dianggap merupakan sasaran penelitian utama untuk mendukung perkembangan ekonomi dan sosial lebih sosial-ekonomis sifatnya.

Kiranya akar dari masalah ini kurang lebih sama dengan apa yang terjadi di Eropa Barat, khususnya di Perancis dan Jerman; ilmu-ilmu sosial yang tidak kuantitatif sifatnya sulit diikutsertakan dalam perumusan kebijaksanaan pembangunan nasional. Karena sifatnya yang tidak kuantitatif itu, maka kecepatan mengolah dan menganalisa ilmu-ilmu ini tidak dapat mengimbangi kecepatan kerja ilmu ekonomi, terutama ekonometri. Di sini pulalah terletak kesulitan suatu pendekatan interdisipliner yang terutama mendasari suatu penelitian kebijaksanaan. Perbedaan dalam ketajaman peralatan analitis dan metodologi yang dimiliki para ahli ekonomi senantiasa akan menyulitkan suatu pendekatan antar ilmu sosial yang bersifat kuantitatif dan non-kuantitatif, kecuali apabila kerangka waktu yang diberikan kepada ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan untuk menyelesaikan suatu penelitian kebijaksanaan lebih panjang dari pada yang diberikan kepada ilmu-ilmu lainnya yang perlu dilibatkan, sehingga pada waktu pengintegrasian hasil-hasil penelitian dimulai data dan analisisnya sudah lengkap.

Kalau ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan mempunyai hambatan-hambatan yang intrinsik, sehingga mereka tidak dapat memberikan sumbangan yang segera kepada para "teknokrat" agar supaya akibat-akibat sampingan yang merugikan dari

pembangunan dapat dihindarkan, maka pada lain pihak para ahli ekonomi tidak sempat mengembangkan dan membina sarana atau landasan ilmu ekonomi nasional yang mampu mempertimbangkan dan mengevaluasi hasil-hasil penelitian mutakhir luar negeri, menyesuaikannya dengan kebutuhan nasional dan membangun suatu teori pembangunan nasional di atasnya, sehingga ketimpangan-ketimpangan itu dapat dikurangi atau di sana sini dihindarkan.

Hal yang sama dapat pula dikatakan dari teknologi. Pengalihan teknologi sering dilakukan tanpa disesuaikan dengan kebutuhan nasional kita. Akan tetapi masalah dalam alih teknologi berbeda dengan dalam alih ilmu. Teknologi yang dapat digunakan dengan lebih tepat di negara-negara sedang berkembang banyak dibatasi pengalihannya oleh pemilik-pemilik teknologi itu sendiri. Lagi pula perlu diperhatikan bahwa motivasi pengalihan teknologi dari pemilik teknologi itu didasarkan pada pemikiran untuk mendapatkan keuntungan seoptimal mungkin dari setiap pembelinya. Dan karena faktor keuntungan ini tidak jarang pula terjadi bahwa kelompok peneliti atau ilmiawan di lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan dan di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di negara kita memperkenalkan bentuk-bentuk teknologi dan mendorong pengalihannya dengan alasan bahwa pengalihan teknologi-teknologi mutakhir yang dikembangkan untuk pasaran di negara-negara maju lebih mudah. Kini memang sudah disadari oleh para ahli teknologi di negara kita bahwa pengalihan teknologi harus memenuhi empat syarat, yaitu bahwa pengalihan teknologi harus dapat dibenarkan dari segi teknis; bahwa alih teknologi harus ekonomis pemanfaatannya; bahwa masyarakat harus dapat menerima pengalihan itu dan bahwa teknologi yang dialihkan tidak merusak lingkungan hidup bangsa.

Akan tetapi harus segera diperingatkan bahwa kemampuan ilmu dan teknologi kita untuk mempertimbangkan alih teknologi berdasarkan empat syarat itu tadi masih kurang dan bahwa kita sendiri belum mempunyai data yang dapat dipercaya tentang sumber daya teknologi yang ada, yang dapat melakukan pengalihan itu. Penilaian kemampuan ini tidak dapat dilakukan oleh para ahli teknologi saja, melainkan merupakan suatu usaha

interdisipliner; ia memerlukan pendekatan ilmu-ilmu sosial, ekonomi, alam, kemanusiaan dan teknologi sekaligus. Perkembangan dan pembinaan landasan ilmu dan teknologi inilah yang perlu mendapat perhatian utama dalam tahun-tahun mendatang.

Dari uraian tadi dapat kita lihat bahwa sistem ilmu dan teknologi yang dikembangkan di dunia Barat dan yang kita alihkan sampai sekarang merupakan suatu sistem yang memper-tumbuhan pembangunan dari atas ke bawah. Keberhasilan yang gemilang dari sistem ini, yang penerapannya ditentukan dari atas dan yang memperhatikan besar-besaran (*quantifiables*) saja, merupakan suatu sistem yang berkecenderungan elitier dan dengan demikian kurang demokratis sifatnya. Kalaupun para ahli ilmu-ilmu sosial non-ekonomi diikutsertakan, maka mereka adalah ahli-ahli yang dapat menggunakan metoda-metoda kwan-titatif, untuk pengadaan data dan pengembangan model-model bagi peningkatan kemampuan perencanaan, perumusan program-program pembangunan dan administrasinya.

Kebijaksanaan ini yang telah berhasil meningkatkan taraf hidup materiil dan intelektual bangsa telah -- seperti kita lihat di wilayah Ero-Amerika -- melahirkan pula reaksi terhadapnya sendiri, terhadap ketimpangan-ketimpangan yang ikut dicipta-kannya, baik dalam bentuk ketimpangan-ketimpangan sosial, maupun psikologi, kulturil dan dalam lingkungan hidup alamiah. Keberhasilan pembangunan itu sendiri juga melahirkan proses emansipasi yang luas di kalangan masyarakat, pembe-basan dari berbagai kekangan sosial yang tradisionil, kemung-kinan dan kesempatan untuk memperbaiki hidupnya baik secara materiil, maupun intelektual dan spirituil dan dengan demikian iktikad untuk ikut menentukan pola-pola pembangunan selan-jutnya, walaupun hal ini masih terbatas pada mereka yang sudah mampu dan trampil untuk memanfaatkannya.

Dunia yang telah kita ciptakan dengan sistem ilmu dan teknologi yang datang dari wilayah Ero-Amerika yang tidak senantiasa pula hidup berdampingan secara damai dengan dunia alamiah kita, telah melahirkan suatu dunia yang lain, yang mempunyai dinamikanya sendiri pula dan yang sering berlawan-an arah dengan sistem yang mempertumbuhkannya. Ketegangan

yang terjadi antara kedua dunia ciptaan kita ini perlu diteliti dan dipelajari, sehingga keberhasilan pembangunan tidak akan terserap habis oleh ketegangan-ketegangan itu. Perkembangan ini sekaligus merupakan suatu imperatif bagi dunia ilmu dan teknologi untuk menyusun kebijaksanaannya bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan baru dalam masyarakat menjurus ke arah suatu sistem ilmu dan teknologi yang lebih cocok dengan tahap-tahap pembangunan berikutnya.

Di sinilah terutama terletak peranan ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan: ilmu-ilmu ini harus dapat dengan segera merekam dan menganalisa dunia "yang baru" ini dan menunjukkan cara-cara untuk menyalurkan dinamikanya ke arah tahap-tahap pembangunan berikutnya, tahap-tahap yang memberikan tempat kepada persepsi dan aspirasi kualitatif bangsa; ilmu-ilmu sosial harus membuka jalan dan menggariskan langkah-langkah ke arah tercapainya bentuk-bentuk kehidupan yang dicita-citakan itu. Ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan perlu menciptakan dan mengembangkan kerangka-kerangka konseptual yang mampu mengarahkan penelitian tentang motivasi, persepsi dan aspirasi rakyat di daerah-daerah, di kabupaten-kabupaten, di kecamatan-kecamatan, agar supaya nilai-nilai baru yang hendak dipertumbuhkan untuk memodernisasi bangsa, seperti orientasi ke masa depan, keberanian untuk mengambil resiko, sikap inovasi, kewiraswastaan, kepercayaan kepada diri sendiri dan lain-lain sifat yang sejenis dapat lebih dirangsang. Usaha ini harus dilakukan dalam rangka suatu teori sosial yang memberi arah kepada pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dikejar tidak akan berkembang mengikuti dinamika ekonomi itu sendiri, melainkan ke arah perwujudan masyarakat adil dan makmur "yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila,"¹ untuk mewujudkan "kemanusiaan yang adil dan beradab" dan untuk mewujudkan demokrasi atau "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan."²

1 GBHN, Bab II, 2, 4

2 Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, II, 2, 4

PERANAN UNIVERSITAS DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ILMU DAN TEKNOLOGI NASIONAL

Universitaslah merupakan sarana atau landasan ilmiah utama pula untuk melakukan penelitian-penelitian sosial dan kemanusiaan yang dibutuhkan, untuk mengembangkan teori-teori ilmu-ilmu sosial yang baru menuju ke arah suatu kerangka konsepsional penelitian pembangunan dan modernisasi dari bawah; ia merupakan tempat utama pula dari mana penyebaran teori-teori dan bentuk-bentuk pengetahuan baru itu dilakukan melalui proses pendidikan. Universitas harus pula berkembang menjadi sarana penyaring dan evaluasi bagi pengalihan pengetahuan mutakhir dari dunia yang lebih maju atau dari sesama negara berkembang, menyesuaikan bentuk-bentuk pengetahuan atau teori-teori yang sudah atau sedang dikembangkan ke arah pembentukan suatu sistem ilmu dan teknologi yang sesuai dengan keperluan kita, dengan sasaran pembangunan kita.

Di sinilah kita menghadapi kesulitan yang cukup besar. Kemampuan universitas-universitas kita dalam pengembangan ilmu, terutama pula ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan masih terbatas walaupun usaha-usaha giat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan itu, namun hasilnya masih jauh dari cukup. Kiranya di samping kekurangan dana yang khronis, struktur universitas-universitas di Indonesia merupakan penghambat utama ke arah ini. Universitas-universitas di Indonesia hanya terbuka bagi pengembangan kurikulum monodisipliner, yang sulit dipertahankan dalam proses pembangunan yang semakin kompleks dan yang menghasilkan dinamika-dinamika sektoral. Karena struktur universitas perlu dirombak dan diganti dengan suatu struktur yang memungkinkan pengembangan kurikulum yang terbuka, yang multidisipliner sifatnya, sehingga cakrawala pengetahuan mahasiswa diperluas dan dengan demikian peralatan analisa mereka.

Dengan dibukanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka kelemahan-kelemahan dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan dapat pula diatasi secara berangsur-angsur. Ilmu-ilmu itu harus digiatkan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan tentang masyarakat kita, terutama di tingkat desa, kabu-

paten dan kota madya, dari dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri, dengan berpangkal tolak dari motivasi, persepsi dan aspirasi penduduk setempat dan bukan dari persepsi dan aspirasi dari atas, dari pusat. Pengetahuan kita masih sangat kurang tentang masalah-masalah transmigrasi, akibat sosial-ekonomis, sosial-politis dan sosial-budaya dari pembangunan prasarana dan pengaruhnya atas transmigrasi spontan; atau bagaimana rakyat di daerah-daerah pegunungan berpendapat tentang penebangan-penebangan pohon atau usaha-usaha penghijauan kembali; atau tentang sikap para petani terhadap pupuk sintetis atau berbagai macam insektisida; atau usaha pembebasan generasi muda dari kekangan adat dan orde sosialnya di tingkat lokal dan regional dan banyak masalah lain lagi. Tanpa pengetahuan yang baik tentang aspek-aspek kehidupan di bawah ini kita tidak dapat menyesuaikan rencana pembangunan kita dengan aspirasi dan kepentingan mereka pula.

Pengembangan suatu sarana pendidikan yang ampuh, yang mampu menunaikan tugas-tugas yang diuraikan tadi tidak mudah dipertumbuhkan dengan begitu cepat dalam waktu yang tersedia bagi kita. Berbagai hambatan lain masih akan kita hadapi dalam menempuh perjalanan ke arah yang kita kehendaki bersama itu, antara lain kurangnya staf pengajar yang berpengalaman, yang rata-rata memerlukan sepuluh tahun untuk menguasai bidang spesialisasinya; mengurangi penugasan sarjana-sarjana yang baru lulus satu-dua tahun, atau baru kembali dari luar negeri untuk mengajar sendiri di tingkat-tingkat permulaan dan yang belum menyadari bahwa "kegunaan ilmu" dapat menjurus ke arah "kekacauan" intelektual, apabila tujuan pengembangan dan penyebarluasan ilmunya itu tidak dapat ditempatkan dalam proporsi yang sebenarnya, yaitu sebagai bagian dari suatu pola pengembangan yang lebih besar, suatu teori atau filsafat nasional mewujudkan Pancasila dalam kenyataan hidup bangsa dan negara kita. Suatu pengembangan ilmu dan teknologi yang tidak dibangun dalam kerangka yang besar itu, tidak akan dapat mempertumbuhkan sistem ilmu dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan nasional kita, sehingga arah perkembangan ilmu dan teknologi dan arah perkembangan masyarakat akan menempuh jalannya sendiri-sendiri.

Salah satu jalan yang dapat diambil untuk mengurangi hambatan-hambatan itu ialah mengalihkan sasaran pendidikan tinggi kita dari "spesialisasi maksimal", yang mendidik setiap mahasiswa dalam bidang-bidang yang sudah dibatasi dengan tajam, ke arah "adaptabilitas maksimal", yang memungkinkan seseorang berpindah dari satu disiplin ke disiplin yang lain, dari satu proyek ke proyek yang lain, dari kegiatan penelitian ke kegiatan-kegiatan yang lain. Sistem pendidikan tinggi yang ber-sasaran "adaptabilitas maksimal" akan lebih mementingkan pemikiran ilmiah, metodologi pengungkapan pengetahuan baru, kemampuan untuk melihat sumber-sumber kesalahan, ketelitian untuk mempersiapkan jalur argumentasi yang rasionil dan bukan lagi pengetahuan yang semaksimal mungkin dari bidang spesialisasinya, sehingga waktu studi dapat dipersingkat dan tenaga-tenaga yang berketrampilan baru ini dapat dihasilkan dengan lebih cepat.

Tentu saja pengembangan sistem ilmu dan teknologi yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasional kita bukanlah hanya tugas dari universitas saja. Ia merupakan tanggung jawab dari kita semua, dari semua lembaga ilmu dan teknologi, baik dari universitas, lembaga-lembaga penelitian di lingkungan departemen-departemen, lembaga-lembaga penelitian non-departemen dan masyarakat ilmiah, terutama pula masyarakat ilmu dan teknologi kita sendiri dan seluruh bangsa. Tetapi universitaslah yang merupakan sumber pengembangan pemikiran ke arah itu dan sumber utama yang menghasilkan tenaga ilmu dan teknologi.

AKHIR KATA

Usaha pengembangan sistem ilmu dan teknologi yang lebih berimbang antara ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan serta ilmu-ilmu alam dan teknologi dan yang lebih responsif terhadap motivasi dan aspirasi dari bawah, merupakan usaha yang harus dilakukan dengan segera. Usaha untuk menjamin kelangsungan pembangunan dan kehidupan bangsa, untuk meningkatkan ketahanan nasional, mengharuskan kita membina kemampuan ilmu dan teknologi kita dalam waktu yang singkat, meningkatkan

keuletan dan ketangguhan dalam mengembangkan dan memperkayanya juga dengan keberhasilan-keberhasilan ilmu dan teknologi mutakhir dari luar negeri.

Syarat yang paling utama bagi pengembangan sistem itu ialah pembinaan dan pengembangan tenaga ilmu dan teknologi kita. Usaha ini harus dilakukan dengan memperbaiki dan mempersingkat sistem pendidikan, dengan menjuruskan pendidikan tinggi ke arah pengembangan kemampuan berpikir secara ilmiah, metoda-metoda pengungkapan pengetahuan baru, ketelitian untuk berargumentasi secara rasionil dan kemampuan untuk melihat sumber-sumber kesalahan. Sasaran pendidikan tinggi yang tradisionil, yang mementingkan penimbunan pengetahuan yang semaksimal mungkin perlu disesuaikan dengan sasaran yang baru ini. Dan karena pendidikan kini merupakan suatu proses seumur hidup, maka sasaran baru ini harus pula diintegrasikan ke dalam kurikulum-kurikulum kursus-kursus penataran, yang banyak diadakan di negara kita. Di samping itu usaha-usaha harus pula dilakukan untuk terus memperbaiki mutu dari tenaga-tenaga ilmu dan teknologi yang ada.

Untuk dapat melaksanakan kesemuanya ini kita memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi apabila kita berniat untuk mengembangkan sistem ilmu dan teknologi kita sendiri, yang sesuai dengan kondisi dinamis kita, maka kita harus berusaha agar sebagian besar dari usaha itu dibiayai dengan dana-dana dalam negeri, baik dari pihak pemerintah, maupun dari pihak swasta. Dan juga di sini dana-dana luar negeri harus merupakan pelengkap saja. Pengurangan ketergantungan dari luar negeri dalam pengembangan sistem kita sendiri juga berarti bahwa kita harus mengurangi peranan tenaga-tenaga ahli asing dalam usaha pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi kita dan dengan demikian dalam usaha pembangunan nasional kita. Masyarakat mereka sendiri -- seperti telah kita lihat di atas tadi -- sedang mengalami berbagai kesulitan dan mereka sendiri sedang mencari jalan keluarnya, sehingga pemanfaatan tenaga-tenaga ahli asing secara tidak selektif dapat mengakibatkan bahwa kita akan kembali mengulangi kesalahan-kesalahan yang mereka buat.

Keberhasilan dari usaha kita untuk mengembangkan ilmu dan teknologi kita sendiri dan atas kekuatan kita sendiri akan lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan, akan lebih meningkatkan taraf hidup rakyat, akan dapat mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin, akan dapat membuka jalan ke arah terciptanya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Ilmu dan teknologi dapat menyediakan pengetahuan untuk memungkinkan itu semua. Akan tetapi ilmu dan teknologi sendiri tidak dapat melaksanakan semuanya. Penggunaan hasil-hasil penelitian ilmiah dengan tepat untuk kepentingan rakyat banyak adalah terutama tugas para pemimpin bangsa, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, di kota, maupun di desa. Ilmu dan teknologi tidak dapat mencari pemimpin yang berjiwa kerakyatan, yang menghayati persepsi, motivasi dan aspirasi rakyat, berbagai kelompok dan lapisan sosial di Indonesia. Apa yang dapat diungkapkan ilmu ialah pengertian yang komprehensif tentang ciri-ciri kepemimpinan yang cocok dan efektif dan cara-cara bagaimana mendorong kemunculannya.

Faktor kepemimpinan inilah, juga dalam pengembangan sistem ilmu dan teknologi nasional, sangat menentukan bagi ketahanan nasional, bagi terlaksananya aspirasi bangsa kita.

DAFTAR BACAAN:

1. Achmad Amiruddin, Pendidikan Tinggi Kita Sekarang, dalam *Prisma* Maret 1978, hal. 14-21
2. James Bryant Conant, *Two Modes of Thought. My Encounters with Science and Education*, Trident Press Book, New York 1946
3. Werner Heisenberg, *Across the Frontiers*, Harper Torchbooks. New York, London 1975. Terjemahan dari *Schritte uber Grenze*, R. Pier & Co. Verlag, Munchen 1971
4. C.P.F. Luhulima, *Perkembangan Ilmu dan Teknologi di wilayah Ero-Amerika*, LRKN-LIPI, Jakarta 1977

5. Muhammadi, Alih Teknologi bagi Pembangunan Indonesia, dalam *Aneka Kegiatan LIPI*, I/1978, hal. 21-29
6. *Perkembangan Sosial-Budaya dalam Pembangunan Nasional*, Hasil Seminar LIPI, 20-24 Januari 1970, Jakarta, 1970
7. J.J. Salomon, *Development of Social Sciences and Science Policy Studies in Europe*, Centre for the Study of Science, Technology, and Development. Council of Scientific and Industrial Research, Rafi Marg, New Delhi, 1976
8. *Science, Growth and Society. A New Perspective*. Report to the Secretary-General's Ad Hoc Group on New Concepts of Science Policy, OECD, Paris 1971
9. Soedjatmoko, *Etika dalam Perumusan Strategi Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*. Kertas kerja yang diajukan pada Seminar Etik Ilmu Pengetahuan dan Peningkatan Mutu Kesarjanaan, Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial, Medan 6-8 Januari 1977
10. Soemitro Djojohadikusumo, *Appropriate Technology*. Keynote Address to Third Inter-Congress of the Pacific Science Association, Bali, Indonesia, 18 July 1977

WIRASWASTA (ENTREPRENEUR) DAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTUMBUHAN DAN PEM- BANGUNAN SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN EKONOMI NA- SIONAL

J. PANGLAYKIM

Tanpa bantuan wiraswasta (entrepreneur) sesuatu perusahaan atau perekonomian tidak akan dapat berkembang atau tumbuh karena hanya wiraswastalah yang mampu menjabarkan sesuatu target ekonomi nasional menjadi suatu mekanisme operasional dan menjamin pengembangan serta kontinuitas sesuatu bangsa. Karenanya maka wiraswasta itu tidak saja menjalankan suatu fungsi yang vital tetapi juga merupakan faktor yang menentukan dalam perekonomian nasional. Ia menciptakan suatu suasana yang dapat dipercaya oleh dunia internasional dan dengan demikian memperluas pengaruh ekonomi negaranya sehingga melampaui batas-batas geografis.

Sebagaimana diketahui dalam perekonomian Jepang satuan-satuan wiraswastanya telah mengambil bentuk perusahaan-perusahaan dagang umum yang dikenal dengan nama *Sogo Shosha* di mana kelima segi kekuasaan yakni modal, management, teknologi, jaringan-jaringan dan pemerintah telah dipadu dan dikerahkan dengan baik. Karenanya maka keberhasilan Jepang di dunia internasional terjadi berkat peranan yang dimainkan oleh wiraswasta dalam struktur kekuasaan yang bersegi lima ini. Satuan-satuan wiraswasta ini kini telah menjadi raksasa-raksasa ekonomi dan merupakan tiang-tiang penyangga Jepang sebagai suatu kekuatan ekonomi raksasa.

BERBAGAI PENDEKATAN DALAM PENELITIAN ATAS WIRASWASTA (ENTREPRENEUR)

Banyak dan berbagai ragam pendekatan dapat ditempuh dalam usaha penelitian atas wiraswasta yang telah menarik perhatian penulis-penulis dari banyak cabang ilmu pengetahuan. Setiap penulis menempuh sesuatu pendekatan yang sesuai dengan segi kepentingan cabang ilmu pengetahuannya masing-masing. Seorang ekonom melihatnya dari segi permintaan yang mencerminkan perangsang-perangsang ekonomi yang timbul dari suatu lingkungan pasaran. Seorang psikolog melihatnya dari segi motivasi yang mencerminkan suatu dorongan batin untuk menjalankan sesuatu tugas dengan hasil baik. Seorang sosiolog yang menganggap perangsang ekonomi itu hanya sebagai salah satu di antara banyak hal yang menentukan, melihatnya dari segi suatu sistem sosial yang mencakup segala-galanya dan memperhitungkan pula faktor-faktor seperti hierarki, kedudukan dan nilai-nilai hidup lainnya yang menentukan ruang gerak si wiraswasta.

Maksud tulisan ini adalah untuk secara selektif menyajikan kepada umum berbagai pandangan tentang wiraswasta dari beberapa penulis dan teori. Hal ini harus kami lakukan karena kami tidak cukup mempunyai bahan bacaan untuk melakukan suatu pengkajian yang menyeluruh, lagi pula bahan-bahan penerbitan berkala mengenai masalah ini yang ada pada kami juga terbatas. Maka diharapkan bahwa kertas ini akhirnya dapat disempurnakan isinya dengan data-data, analisa-analisa dan keterangan-keterangan tambahan dan juga pembetulan-pembetulan.

Schumpeter¹

Menurut Schumpeter para wiraswasta "...didorong oleh keinginan memperoleh kekuasaan tetapi mereka itu agak lebih maju dari jamannya, bahwasanya mereka itu berhasil mewujudkan apa yang dikehendaknya semata-mata karena kekuatan kemauan dan semangat kerjanya, bahwasanya mereka

¹ Diambil dari buku berjudul: *The Effective Entrepreneur*, Charles Swayne dan William Tucker, General Learning Press, 1973

tidak cemas tentang hambatan-hambatan kemasyarakatan dan bahwasanya mereka itu terdapat di antara semua suku bangsa." Penulis ini pun tergolong mereka yang berpendapat bahwa wiraswasta itu adalah suatu perantara manusiawi di sekitar mana sesuatu perekonomian berkembang dan yang titik beratnya terletak pada pembaruan dan pengambilan risiko-risiko yang sudah diperhitungkan terlebih dahulu. Perlu disebutkan di sini bahwa Schumpeter tidak saja memberi tekanan pada pembaruan dalam arti teknologi tetapi ia juga memperhitungkan semua segi yang lain. Ia menekankan bahwa dalam memperbarui sesuatu terdapat sesuatu cara di mana tugas dapat dilakukan dengan hasil yang baik.¹ Kiranya dalam hubungan ini sewajarnya kita mengutip kembali kata-kata Schumpeter sendiri² sebagai berikut:

"Pada saat-saat cara hidup borjuis mengikat seseorang sedemikian rupa sehingga ia tidak lagi tertarik oleh cara-cara hidup lainnya maka kemungkinan-kemungkinan (memperoleh kekayaan) ini dapat menarik sebagian terbesar dari mereka yang kemampuan otaknya lebih dari biasa dan mempersamakan keberhasilan dengan keberhasilan dalam usaha. Kemungkinan-kemungkinan ini tidak akan ditempuh orang begitu saja namun di dalamnya terkandung suatu campuran peluang yang cukup menarik: permainan ini tidaklah seperti rulet tetapi lebih banyak seperti poker. Kemungkinan-kemungkinan ini merupakan tantangan terhadap kemampuan, semangat kerja dan kesanggupan yang luar biasa untuk bekerja tetapi seandainya ada suatu cara untuk mengukur kesanggupan itu secara umum atau prestasi pribadi yang terkandung dalam sesuatu keberhasilan tertentu maka akan ternyata bahwa kepuasan yang diperoleh daripadanya pada hakikatnya tidak akan proporsional pula."

Hagen³

Menurut Hagen kepribadian wiraswasta hanya dapat terbentuk dalam suatu jangka waktu yang meliputi beberapa generasi. Menurut dia proses ini harus melalui beberapa tahap perkembangan yakni:

- 1 Lihat tulisan oleh J. Panglaykim/1. Palmer yang berjudul: *Entrepreneurship and Commercial Risks, The Case of a Schumpeterian Business in Indonesia*, Institute of Business Studies, College of Graduate Studies, Nanyang University, Occasional Papers No. 2, 1970
- 2 J.A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democracy*, hal. 73, Allen and Unwin, London, 1961
- 3 E.E. Hagen, *On the Theory of Social Change*, Homewood, Illinois, Dorsey Press, 1962

- a. Tingkat pendidikan anak yang otoriter tradisional: Tingkat perkembangan ini menghasilkan suatu generasi anak-anak yang secara umum dapat diklasifikasikan sebagai tidak berkecenderungan mengadakan pembaruan-pembaruan (non-innovational).
- b. Tingkat penarikan diri dari kedudukan (status withdrawal): Penarikan diri dari kedudukan dapat disebabkan oleh perubahan-perubahan yang dialami anak dalam lingkungan keluarganya misalnya hilangnya rasa hormat terhadap lambang-lambang yang tadinya bernilai kemasyarakatan yang tinggi, lambang-lambang kedudukan yang anakronistik, atau penolakan terhadap kedudukan yang akan diperoleh. Jika ini terjadi maka akan terjadi suatu perubahan. Penarikan diri dari kedudukan dapat menimbulkan kemarahan dan kecemasan yang pada gilirannya dapat juga mengakibatkan ditekannya nilai-nilai.
- c. Tingkat perlindungan yang berlebihan: Dalam suatu lingkungan keluarga dapat terjadi ketegangan-ketegangan sebagai akibat usaha melindungi anak secara berlebih-lebihan terhadap ketegangan-ketegangan yang disebabkan oleh penolakan terhadap nilai-nilai.
- d. Peralihan: Suatu keadaan yang tegang dapat terjadi pada waktu nilai-nilai mengalami proses peralihan dan karenanya dapat menimbulkan suatu situasi yang menurut Hagen menciptakan "..... kebutuhan yang besar akan ketertiban, kehematan dan prestasi." Penghalangan sosial dapat menghasilkan seorang pengusaha, "..... seseorang yang berkemampuan memecahkan persoalan-persoalan secara kreatif, yang senantiasa membutuhkan prestasi yang tinggi dan yang senantiasa membawa suasana ketertiban dan otonomi."

Yang dimaksudkan Hagen mungkin adalah suatu periode atau situasi ketika masyarakat misalnya memandang rendah atau meremehkan wiraswasta dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kaum feodal. Dalam sesuatu keluarga dapat muncul suatu generasi yang tidak dapat menerima situasi demi-

kian sehingga menimbulkan kehadiran sang wiraswasta yang mula-mula berusaha sebagai seorang wiraswasta kecil dan akhirnya menjadi seorang wiraswasta besar. Dalam suatu masyarakat yang tadinya tidak menerima kehadirannya kedudukannya dalam dunia usaha menanjak sedemikian rupa sehingga akhirnya ia diakui sebagai seorang pemimpin perkembangan ekonomi sebagaimana yang terjadi dalam sejarah perkembangan industri di negara-negara industri seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang dan lain-lainnya.

McClelland¹

McClelland meletakkan tekanan pada pengaruh orang tua sang wiraswasta. Orang tua yang senantiasa mengharap-harapkan atau menuntut prestasi yang tinggi dari anak-anaknya tetapi tidak campur tangan dalam kegiatan namun ikut merasakan suka duka prestasi anak-anaknya, dapat menghasilkan wiraswasta-wiraswasta. Kebutuhan akan prestasi dianggap oleh McClelland sebagai suatu kekuatan utama dan dirumuskan olehnya sebagai "..... keinginan untuk melakukan sesuatu dengan baik bukan terutama untuk memperoleh pengakuan masyarakat atau gengsi tetapi demi mendapatkan sesuatu kepuasan batin telah mewujudkan sesuatu".

Dalam sebuah tulisan dalam edisi Maret/April 1976 majalah *Harvard Business Review* yang berjudul "Kekuasaan adalah Motivator yang besar" karangan bersama McClelland dan David H. Burukom nampaknya kedua penulis ini sangat menentingkan kekuasaan sebagai motivasi wiraswasta. Kekuasaan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi kelakuan manager-manager lain mungkin dapat membawa manfaat yang besar bagi organisasi. Selain kebutuhan yang besar akan disiplin kata mereka penggunaan kekuasaan ini "..... perlu disertai kedewasaan dan kemampuan mengendalikan diri yang besar". Seterusnya mereka berpendapat bahwa kekuasaan sebagai motivasi tidak sewajarnya berorientasi pada usaha memperoleh kekayaan pribadi tetapi pada lembaga di mana ia bekerja. Dari segi penglihat-

1 David C. McClelland, *The Achieving Society*, Princeton, D. van Nostrand, 1961

an wiraswasta sendiri kekuasaan sebagai motivasi berhubungan erat dengan suatu keinginan yang kuat akan kebebasan atau akan tiadanya kekuatan-kekuatan yang membatasi. Wiraswasta itu ada karena adanya kebebasan bergerak dan kemungkinan memperoleh peluang-peluang.

Teori Sifat

Menurut teori sifat, wiraswasta harus memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dirumuskan di bawah ini:

1. *Umum*

Pada umumnya wiraswasta itu adalah seorang manager yang kuat dan giat dalam gerak-gerak usaha atau industrinya. Ia seorang perencana yang baik tetapi ini tidak berarti ia harus dapat menulis dengan baik atau dengan cara yang tertentu. Ia mampu memilih orang-orang yang tepat sebagai pembantunya dan menggiatkan serta mendorong mereka untuk bekerja dan berhasil. Gayanya biasanya bersifat otokratis. Ia menekankan segi memperoleh hasil. Sifatnya yang unik adalah kemampuannya memadu kesanggupan motivasi dengan produksi. Dalam pembicaraannya di dalam organisasi atau di luarnya biasanya ia sangat tegas dalam mengutarakan pikiran-pikiran atau kehendaknya.

2. *Sifat-sifat yang lebih khusus*¹

- a. Kecerdasan: Wiraswasta harus cerdas untuk dapat menjadi seorang wiraswasta yang efektif;
- b. Pendirian positif dan kepercayaan pada diri sendiri;
- c. Berorientasi pada tujuan-tujuan: Baginya yang penting bukanlah bagaimana melakukan sesuatu secara tepat tetapi bagaimana menentukan hal-hal yang tepat untuk dilakukan;
- d. Berorientasi pada perbuatan: Wiraswasta adalah seseorang yang mampu menimbulkan kejadian-kejadian;

¹ Charles Swayne & William Tucker, *The Effective Entrepreneur*, General Learning Press, 1973

- e. Sikap mengambil risiko: Wiraswasta senantiasa merasa tidak aman untuk memandang ke hari depan dengan perasaan gentar;
- f. Berkulit tebal: Wiraswasta harus mampu bertahan di bawah tekanan dan kesepian yang dibawa atau terkandung dalam kedudukannya sebagai wiraswasta. Ia juga harus mampu membawa dirinya keluar dari sesuatu kesulitan dan menganggapnya sebagai suatu tantangan jika ia bekerja di bawah tekanan;
- g. Ingin tahu secara selektif: "..... kecenderungan untuk menyelidiki, meneliti dan membanding-bandingkan setiap tahap sesuatu kegiatan, adalah satu sifat penting yang membedakan orang ini dari pemimpin dalam usahanya memperoleh keberhasilan, prestasi dan kekayaan besar."¹
- h. Ia harus mampu bersaing dalam setiap situasi dan bersikap cukup agresif;
- i. Ia harus kreatif.

Mc Gregor²

Menurut McGregor struktur industri dan usaha sekarang di negara-negara industri telah beralih dari gaya struktur management otoriter menjadi apa yang didefinisikannya sebagai suatu struktur management yang berpartisipasi. Ini, katanya, dapat membawa suatu organisasi yang lebih efisien dan memberikan perangsang kepada para pembantu wiraswasta untuk berkembang dalam suatu suasana yang lebih manusiawi.

McGregor membandingkan gaya management otoriter yang lama yang kita namakan saja X, dengan gaya management yang baru yang lebih dinamis, modern dan berkecenderungan memperbarui (innovative). Menurut dia teori X didasarkan atas tiga asumsi yaitu:

1. Manusia umumnya tidak menyukai kerja dan akan berusaha, jika mungkin, untuk menghindarinya.

¹ Diambil dari buku Charles Swayne yang berjudul *The Effective Entrepreneur*

² Douglas McGregor, *The Human Side of Enterprise*, New York, McGrawhill, 1960

2. Maka manusia harus dipaksa untuk bekerja - didorong, dikendalikan, dibimbing dan ditakut-takuti dengan tindakan-tindakan - untuk memungkinkan mereka menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan pelaksanaan tugas-tugasnya.
3. Manusia lebih suka dibimbing; mereka berusaha menghindari tanggung jawab dan secara relatif tidak ambisius. Karenanya maka yang dikehendaknya atau dicarinya hanyalah keamanan.

Hal ini dibantah oleh teori Y yang menyatakan:

1. Pengalaman telah mengajarkan bahwa manusia tidak menjauhi kerja; manusia biasanya mempunyai keinginan untuk bekerja. Selain itu kerja memberikan kepada manusia suatu sumber kepuasan atau ketidakpuasan sesuai dengan kondisi atau situasi yang berlaku pada sesuatu saat.
2. Melakukan penekanan-penekanan bukanlah satu-satunya jalan untuk memaksa manager-manager bekerja ke arah tercapainya tujuan-tujuan organisasi; mereka mempunyai kemampuan pengendalian dan pengarahan diri sendiri.
3. Tekad untuk mencapai tujuan-tujuan merupakan usaha yang timbul dari hasil-hasil yang bersangkutan dengan prestasi-prestasi - pemuasan ego dan kebutuhan-kebutuhan yang memenuhi diri sendiri.
4. Manusia belajar dalam kondisi-kondisi yang wajar dengan tujuan menerima ataupun mencari tanggung jawab.
5. Kemampuan membayangkan sesuatu, mencari jalan keluar yang cepat dan menciptakan sesuatu jika terjadi suatu masalah keorganisasian yang harus dipecahkan bukanlah sesuatu yang terbatas melainkan sesuatu yang dimiliki oleh banyak orang dalam suatu masyarakat yang sudah maju. Mereka yang berani memikul tanggung jawab adalah mereka yang mempunyai cita-cita dan ambisi.
6. Masyarakat dan organisasi nampaknya tidak memperoleh manfaat dari potensi intelektual yang ada dalam industri modern dan masyarakat modern.

Teori-teori X dan Y masing-masing mengandung kebenaran tersendiri sebab tidak semua manusia itu malas dan tidak menyu-

kai kerja. Mereka yang berbakat didorong ke atas oleh ambisi dan motivasi; karenanya mereka tidak menghindari tanggung jawab.

Maccoby¹

Maccoby seorang psikolog yang juga belajar. Ia mengatakan sehubungan dengan wiraswasta bahwa pekerjaannya sekarang berkecenderungan "mengembangkan otaknya tetapi tidak mengembangkan hatinya". Ini adalah suatu generalisasi yang menarik karena tekanan-tekanan hidup dalam suatu masyarakat industri adalah demikian beratnya sehingga sang wiraswasta biasanya demikian sibuknya dengan pekerjaannya sehingga ia sering lupa di dunia ini ada banyak hal lain yang menarik. Maccoby menyebutkan empat tipe wiraswasta di bawah ini. Salah satu di antaranya mempunyai sifat-sifat watak pemimpin perusahaan modern:

- a. *Tipe pekerja trampil (craftsman)*: Tipe pengusaha ini memegang teguh nilai-nilai tradisional yang ditandai oleh penimbunan produktif. Ia juga menjunjung tinggi nilai susila kerja dan memperhitungkan mutu dan kerajinan. Ia suka membangun dan mencipta. Dalam pekerjaannya ia memperhatikan hanya satu bagian dari organisasinya. Tujuannya adalah mencapai keadaan yang sedikit-dikitnya mendekati kesempurnaan. Maka dalam kenyataannya dia tidak mampu atau tidak cukup mampu untuk mengelola suatu organisasi yang besar dan rumit dan menyesuaikan diri kepada perubahan-perubahan yang cepat. Ia lebih banyak berorientasi pada aspek produksi. Banyak wiraswasta lebih memperhatikan segi produksi dan penciptaan dan melupakan semua segi lainnya.
- b. *Tipe pejuang rimba (jungle fighter)*: Tujuan pengusaha tipe ini adalah kekuasaan. Ia banyak pengalaman hidup. Baginya pekerjaannya adalah bagaikan suatu hutan (bukan

¹ *The Gamesman, The New Corporate Leaders*, Michael Maccoby, New York, Simon & Schuster, 1976

suatu permainan) di mana ia harus dapat mempertahankan hidupnya atau mati. Ia menganut pandangan bahwa si penakluk dan yang berkuasa menguasai mereka yang ditaklukkan. Dalam kelompok ini terdapat dua sub tipe wiraswasta yakni sub tipe musang dan sub tipe singa. Wiraswasta sub tipe singa adalah seorang penakluk. Jika berhasil ia akan membangun suatu gabungan perusahaan yang mirip suatu negara besar. Wiraswasta sub tipe musang di lain pihak lebih banyak memperhatikan soal kedudukannya dalam hierarki organisasi yang telah diperolehnya dengan cara diam-diam dan politik bahkan mungkin juga dengan cara-cara "adu domba."

- c. *Tipe orang organisasi*: Tipe wiraswasta ini adalah seorang manusia organisasi, seseorang yang mengidentifisir dirinya dengan suatu organisasi dan mempunyai kewibawaan serta kekuasaan. Ia lebih banyak memperhatikan daya sumber tenaga kerja dan perasa terhadap karyawan dan lingkungannya. Ia selalu menjaga integritas organisasi. Tipe orang perusahaan yang lemah agaknya bersifat penakut dan penurut. Ia lebih banyak mementingkan keamanan daripada keberhasilan. Orang perusahaan yang kreatif mudah diajak bekerjasama dan mempunyai daya pendorong serta kesanggupan bekerja dengan pihak lain untuk keuntungan timbal balik. Orang perusahaan yang tidak begitu kreatif lebih banyak bersifat penurut yang merasa senang menjadi anggota suatu organisasi besar dan ternama.
- d. *Orang wiraswasta modern — gamesman*: Tipe wiraswasta ini lebih mirip tipe pengusaha modern golongan teratas. Pada dasarnya ia mempunyai watak dan bakat seorang wiraswasta dalam arti kata yang seluas-luasnya. Ia gemar menghadapi tantangan-tantangan, bergerak dalam suatu dunia yang penuh persaingan dan menunjukkan kegigihannya dalam perjuangan untuk akhirnya muncul sebagai pemenang. Wiraswasta tipe ini tidak sabar dengan mereka yang lamban dan terlalu berhati-hati. Ia suka mengambil risiko-risiko dan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ia memandang dan memberikan

jawaban-jawaban kepada hidup dan pekerjaan seolah-olah ia sedang melakukan suatu perdamaian. Tantangan-tantangan membuatnya bergerak dan menimbulkan kegairahan pada mereka yang bekerja di sekitarnya. Ia suka kepada konsep-konsep, gagasan-gagasan baru, teknologi-teknologi baru dan selalu mencari jalan-jalan mencapai tujuan yang lebih pendek. Pembawaan pribadi dan pemikirannya bersifat dinamis, cepat, brilyan dan ia tidak pernah kehilangan akal. Tujuan hidupnya adalah menjadi pemenang dan ia selalu menggunakan taktik serta strategi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Orang permainan ini dilihat oleh Mac-coby sebagai wiraswasta tipe pemimpin, seorang pemimpin perusahaan yang dapat melakukan suatu usaha dengan berhasil. Ia juga dapat membawa keberhasilan dan kontinuitas pertumbuhan dalam suatu organisasi.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanpa kepemimpinan oleh orang wiraswasta modern yakni pemimpin perusahaan yang modern, suatu organisasi tidak akan dapat mencapai tingkat perkembangan yang matang dan mengalami kontinuitas pertumbuhan karena si pekerja tangan lebih banyak menyibukkan dirinya dengan produksi, si pejuang rimba dengan kekuasaan dan si orang perusahaan dengan keamanan dengan mengorbankan semua hal lainnya.

KESIMPULAN-KESIMPULAN DARI PENDEKATAN-PENDEKATAN YANG BERBEDA-BEDA DALAM PENELITIAN ATAS WIRASWASTA

Dalam pendekatan yang berbeda-beda dalam usaha penelitian atas wiraswasta kita melihat bahwa semua penulis memberi tekanan pada kepribadian wiraswasta yang mampu menggerakkan dan mengkombinasikan segi-segi modal, teknologi dan tenaga kerja dalam usahanya mengembangkan dan menumbuhkan organisasinya.

Penulis yang berasal dari disiplin ilmu ekonomi melihatnya dari segi permintaan. Struktur ekonomi harus dapat berjalan atas dasar hukum permintaan dan penawaran agar suatu meka-

nisme pasaran dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan wiraswasta.

Dalam suatu sistem ekonomi di mana negara adalah pemilik faktor-faktor produksi wiraswasta swasta tidak ada. Tempatnya diambil oleh wiraswasta negara sebagaimana halnya dalam organisasi-organisasi besar di negara-negara komunis. Tetapi di negara-negara komunis ini titik beratnya tidak diletakkan pada pribadi-pribadi tetapi pada kelompok atau organisasinya sendiri. Haruskah kita berkesimpulan bahwa wiraswasta-wiraswasta yang bekerja sebagai pribadi-pribadi hanya terdapat di negara-negara yang bersistem ekonomi nonsosialis (komunis)? Kami telah menyebutkan kata "komunis" karena di negara-negara yang berkecenderungan mengarah kepada sosialisme seperti Singapura kita masih melihat adanya wiraswasta-wiraswasta yang bekerja secara pribadi di samping wiraswasta-wiraswasta negara.

Yang pokok dalam wiraswasta itu adalah kepribadiannya. Karenanya maka segi-segi dari kepribadiannya itu seperti sifat mengambil prakarsa, membuat pembaruan, dorongan ego, kebutuhan untuk berprestasi, harga diri, semuanya terkandung dalam dirinya. Semua sifat ini berkisar sekitar suatu keinginan batin untuk melaksanakan suatu tugas yang sulit dengan baik. Karenanya maka yang terpenting dan terutama adalah bahwa suatu sistem ekonomi harus memungkinkan dan menyediakan peluang-peluang bagi wiraswasta untuk berkembang dan tumbuh sehingga orang-orang yang memiliki dorongan batin ini dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Jika Schumpeter melihat si wiraswasta itu sebagai seorang pembaru dan pengambil risiko, Hagen berpendapat bahwa sang wiraswasta itu harus melalui beberapa tingkat perkembangan.

Menurut hemat kami wiraswasta di jaman pra-industri modern lebih banyak berorientasi pada pribadinya sendiri daripada pada organisasi. Nama-nama seperti Ford, Tan Kah Kee, Oei Tiong Ham, Rockefeller, C.Y. Tung, Y.K. Poa, Philips menimbulkan pada kita rasa hormat yang tinggi terhadap daya kemauan mereka yang kuat untuk berhasil. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang memiliki kepribadian yang menonjol dan dapat digolongkan sebagai orang-orang yang "membuat dirinya sendiri".

Tetapi jika kita memperhatikan perkembangan-perkembangan sekarang di negara-negara industri dunia kita melihat bahwa tipe wiraswasta jaman modern ini yakni tipe yang merupakan hasil jaman modern ini, lebih banyak ditandai oleh sifat-sifat tipe wiraswasta orang wiraswasta modern (gamesman). Dalam hubungan ini "gamesman" dilihat sebagai seseorang yang memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang lebih dari biasa, seseorang yang tidak takut menghadapi tantangan-tantangan dan mempunyai daya mendorong diri untuk bersaing dan menang. Ciri-ciri wataknya yang lain adalah ketidaksabaran, keinginan agar tugas-tugas pekerjaan diselesaikan dengan cepat, efisien dan dengan hasil baik dan kemampuan untuk menggerakkan organisasinya sehingga organisasi itu membantunya dalam usahanya memperoleh keberhasilan. Menurut Macco-by suatu perusahaan niaga atau industri dan demikian pula suatu gabungan perusahaan yang besar dan rumit, tidak akan dapat mencapai suatu tingkat perkembangan yang matang jika perusahaan atau gabungan itu tidak dipimpin oleh wiraswasta-wiraswasta tipe "gamesman".

Kita tidak menyangkal bahwa wiraswasta itu memiliki sifat-sifat kepribadian yang semuanya lebih dari biasa tetapi kita juga berkeyakinan bahwa sifat-sifat kepribadian ini bukanlah hal satu-satunya yang menentukan keberhasilannya. Menurut hemat kami suatu sistem ekonomi harus pula memberi peluang kepada wiraswasta untuk membuktikan kebolehnya dan memberikan pengakuan kepadanya atas keberhasilannya. Misalnya di suatu negara komunis wiraswasta tidak diberikan tempat dan peluang yang sama seperti yang dapat diperolehnya di negara-negara yang bersistem ekonomi "terbuka". Di bawah sistem komunis wiraswasta perorangan yang mampu menggunakan bakat-bakat dan sifat-sifat kepribadiannya mungkin kurang diberi peluang. Sungguhpun sistem ekonominya mungkin juga didasarkan atas sistem "ekonomi terbuka" wiraswasta yang menginginkan sukses juga harus sanggup menyesuaikan dirinya dengan adat-istiadat, kelakuan, cara hidup dan nilai-nilai budaya masyarakat di mana dia berusaha. Dalam suatu masyarakat di mana terdapat persoalan-persoalan yang timbul dari pembatasan-pembatasan sosial yang ketat wiraswasta dengan kepribadian yang dimiliki orang wiraswasta modern mungkin sekali dianggap sebagai

oknum yang tidak dikehendaki dalam masyarakat. Karenanya maka ia tidak boleh mengikuti kemauannya secara bebas dan ia pun harus pandai menahan dirinya untuk tidak meluaskan kegiatan-kegiatannya ke sektor-sektor yang dianggap rawan dari segi politik. Terutama di negara-negara yang sedang berkembang di mana masalah-masalah minoritas dan mayoritas berakar dalam asal kesukuan kelompok-kelompok masyarakat (seperti halnya di Asia Tenggara) wiraswasta nonpribumi jelas harus memperhitungkan segi sosial politik ini.

Singkatnya wiraswasta yang ingin mengadakan pembaruan-pembaruan hanya dapat berkembang sepenuhnya dan dengan cara yang efisien dan efektif jika sistem ekonomi yang bersangkutan memberikan kepadanya suatu peluang, tempat dan peranan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Walaupun di dalam suatu sistem ekonomi "terbuka" kesemuanya ini diberikan kepada wiraswasta ada tanda-tanda di negara-negara yang sedang berkembang bahwa di negara-negara ini wiraswasta masih mengalami pembatasan-pembatasan berusaha yang bersifat ekonomi, budaya, politik maupun sosial.

Di negara-negara industri wiraswasta telah berhasil mengatasi pembatasan-pembatasan non-ekonomi ini sedangkan wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang pun telah menunjukkan indikasi-indikasi akan kemampuannya untuk mengatasinya pula. Sudah dapat dipastikan bahwa ada perubahan-perubahan dalam proses perkembangan ekonomi tetapi apa yang tersangkut dalam perubahan-perubahan ini belum diketahui. Namun salah satu pembatasan utama yang terasa adalah dalam hal perkembangan kelembagaan. Berlainan dengan keadaannya di negara-negara yang sudah berkembang seperti Jepang di negara-negara yang sedang berkembang terdapat faktor-faktor tertentu yang menghambat perkembangan kelembagaan ini.

Jepang adalah suatu contoh yang baik dari suatu negara di mana wiraswasta tipe "gamesman" memainkan peranan yang efektif karena dia dibantu oleh perkembangan lembaga-lembaga yang efisien seperti perusahaan-perusahaan dagang umum dengan struktur kekuasaan bersegi lima — modal, management,

teknologi, jaringan-jaringan internasional dan dukungan pemerintahan. Segi perkembangan kelembagaan akan dibicarakan secara tersendiri.

Setelah kita menganalisa siapa sebenarnya si wiraswasta itu dan peranan yang mungkin dimainkannya di negara-negara yang sedang berkembang baiklah kita sekarang meninjau apa yang diharapkan daripadanya sebagai pemegang peranan itu.

Peranan Wiraswasta

Dalam tulisannya yang terbit dalam edisi September 1977 majalah *Asian Survey* dengan judul: "Entrepreneurship Education in Developing Countries" Robert E. Nelson mengatakan bahwa peranan wiraswasta itu mempunyai arti yang penting sekali karena ia menyangkut boleh dikata semua segi kehidupan. Karena peranan wiraswasta itu pada umumnya menyangkut bisnis dan perekonomian maka perumusan Nelson dapat dikatakan bersifat cukup luas.

Dalam hubungan ini dikatakannya "..... Tetapi kewiraswastaan dapat dihubungkan dengan semua dimensi kehidupan. Dalam arti kata yang seluas-luasnya kewiraswastaan dapat merupakan sarana untuk mendorong kreativitas dan pembaruan yang diperlukan untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik, suatu bangsa yang lebih baik, dan suatu dunia yang lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan ini kebijakan-kebijakan pemerintahan tertuju pada segi-segi pendidikan untuk mengembangkan bakat-bakat kewiraswastaan yang banyak terdapat dalam setiap masyarakat". Dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa tujuan utama wiraswasta adalah untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih baik, suatu negara yang lebih makmur dan juga suatu dunia yang lebih baik. Diharapkan tujuan ini dapat tercapai dengan kreativitas dan pembaruan tetapi wiraswasta harus ditunjang oleh suatu kebijakan yang memadai di bidang pendidikan. Menurut hemat kami hal ini saja tidaklah cukup karena kebijakan-kebijakan pemerintah harus pula dirumuskan sehingga tertuju pada penciptaan lembaga-lembaga yang efektif dan efisien yang memungkinkan wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang menciptakan mekanisme-mekanisme dan sarana-sarana yang diperlukannya untuk menjalankan tugasnya.

Dikatakan bahwa wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang merupakan tiang yang menyangga dunia usaha dan industri. Wiraswasta membantu mewujudkan aspirasi-aspirasi pemerintah dan bangsa dengan mencapai target-target pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang harus sanggup mengatasi semua pembatasan-pembatasan yang ada di sektor-sektor politik, ekonomi, sosial, kelembagaan dan pemerintah. Jika kita mempelajari peranan wiraswasta kita akan melihat bagaimana negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura telah dikembangkan dalam kenyataannya. Negara-negara ini sekarang menduduki tempat-tempat yang penting di dunia internasional karena para wiraswastanya telah sanggup menciptakan kemakmuran untuk negaranya dan sesama warga negaranya dan kesemuanya ini telah mereka lakukan dengan cara yang realistis dengan bantuan lembaga-lembaga yang telah mereka ciptakan.

Kami telah menyebutkan Jepang sebagai contoh karena kebijakan negara ini kemudian telah diterapkan pula dan disesuaikan dengan berhasil di Korea Selatan dan Singapura. Dalam proses penciptaan suatu keadaan yang dapat membantu tercapainya tujuan nasional yakni kemakmuran bangsa dan rakyat Jepang, dengan dibantu oleh para wiraswastanya (sebagian besar mungkin dari tipe "gamesman"), telah menciptakan suatu struktur kekuasaan bersegi lima yakni modal, management, teknologi, jaringan internasional dan dukungan pemerintah. Perusahaan-perusahaan dagang besar yang dahulu dikenal dengan nama *Zaibatsu*, kemudian *Keiretsu* dan sekarang *Sogo Sosha* telah mengkombinasikan keempat segi kekuasaan pertama dengan baik. Dengan bantuan pemerintah kesepuluh perusahaan transnasional besar seperti Mitsui, Mitsubishi, C. Itoh, Marubeni dan lain-lainnya telah membentuk kelompok-kelompok dan gabungan-gabungan yang kemudian menjadi kekuatan penggerak dalam perkembangan ekonomi dan niaga Jepang. Bersama-sama perusahaan-perusahaan ini merupakan suatu struktur kekuasaan yang hampir tiada taranya di dunia. Perusahaan-perusahaan multinasional Barat hanya menguasai suatu segitiga kekuasaan yakni modal, management dan teknologi. Sering mereka pun tidak mempunyai jaringan internasional ataupun jika ada jaringan mereka tidak cukup luas. Berlainan dengan perusahaan-

perusahaan Jepang, mereka pun tidak mendapat dukungan pemerintah sepenuhnya.

Karenanya maka peranan wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang tidak dapat dijalankan dengan keberhasilan maksimal jika mereka tidak dapat menciptakan lembaga-lembaga yang mampu mengkombinasikan kelima segi kekuasaan seperti yang disebutkan di atas. Ini berarti bahwa wiraswasta dan tipe lembaga-lembaga merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam usaha mewujudkan aspirasi-aspirasi nasional maupun internasional secara berhasil.

Segi Penciptaan Lembaga-lembaga yang Memadai

Pembangunan ekonomi di beberapa negara yang sedang berkembang berjalan lamban atau macet terutama karena adanya konflik-konflik dan kecurigaan-kecurigaan intern.

Di lain pihak ada juga negara-negara yang sedang berkembang yang telah berhasil mengatasi konflik-konflik dan kecurigaan-kecurigaan intern ini demi kepentingan pertumbuhan ekonominya.

Dalam bukunya yang berjudul *Institutions of Economic Growth: A Theory of Conflict Management in Developing Countries*, Princeton University Press, 1972, John Powell mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional ditentukan antara lain oleh kemampuan nasional untuk menciptakan lembaga-lembaga yang dapat menguasai konflik-konflik tetapi kemampuan ini memerlukan dukungan konsensus nasional. Dengan demikian maka kita berpendapat bahwa peranan wiraswasta saja tidaklah cukup. Harus ada segi lain yang juga menentukan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang yakni kemampuan dan kesanggupan menciptakan lembaga-lembaga yang memadai, efisien dan efektif.

Kita telah membatasi diri kita pada penciptaan lembaga-lembaga di sektor bisnis dan sejarah bisnis telah menunjukkan bahwa wiraswasta telah cukup berhasil dalam hal ini. Karenanya

kami berpendapat bahwa negara-negara yang sedang berkembang sewajarnya memikirkan dan mempertimbangkan penciptaan perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan perkembangan (growth and development corporations).

Perusahaan-perusahaan Pertumbuhan dan Perkembangan

Negara-negara yang sedang berkembang menghadapi masalah-masalah yang rumit. Stabilitas politik adalah suatu prasyarat untuk mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi tetapi pertumbuhan harus pula disertai pembangunan. Pembangunan dalam konteks ekonomi berarti melakukan usaha dan mewujudkan pemerataan hasil-hasil pendapatan nasional. Kecenderungan yang nampak sekarang adalah menyajikan kepada masyarakat umum indikator-indikator ekonomi yang memproyeksikan proses pertumbuhan dengan angka-angka makro artinya dengan angka-angka hasil penjumlahan. Jika indikator-indikator ekonomi ini dianalisa sehingga nampak perincian berbagai komponen yang kesemuanya merupakan sebagian dari keseluruhan prestasi nasional, maka mungkin sekali kita akan menemukan perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang di antara berbagai sektor kegiatan ekonomi misalnya antara sektor industri dan lembaga-lembaga keuangan nasional; antara sektor produksi dan sektor pemasaran, antara berbagai kelompok pengusaha, niagawan dan industrialis. Sektor industri telah berkembang cukup banyak. Untuk sebagian ini merupakan hasil jumlah perusahaan patungan (joint venture) yang dibentuk antara pengusaha-pengusaha nasional dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang besar. Pemasukan kesanggupan-kesanggupan dan kemampuan-kemampuan perusahaan-perusahaan multinasional (Amerika, Jepang dan lain-lainnya) ke dalam sektor industri telah membawa sektor ini ke dalam lingkungan pengaruh dunia industri internasional.

Di lain pihak lembaga-lembaga keuangan nasional di beberapa negara yang sedang berkembang tidak diperkenankan bekerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan asing khususnya dengan bank-bank multinasional. Akibatnya sebagaimana telah kita catat ialah bahwa sistem perbankan swasta nasional tidak mempunyai kemampuan untuk melayani permintaan yang

kian meningkat dari sektor industri dalam hal jumlah maupun macam jasa keuangan yang diperlukan sektor ini. Jasa-jasa yang diperlukan perusahaan-perusahaan patungan modern diberikan oleh bank-bank internasional atau perusahaan-perusahaan multinasional yang berafiliasi pada perusahaan-perusahaan Jepang *Sogo Shosha* yang lebih terkenal atau perusahaan-perusahaan niaga umum. Perkembangan tak seimbang antara berbagai sektor kegiatan ekonomi diperburuk lagi oleh kurangnya atau tiadanya pembangunan kelembagaan yang memadai. Berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi telah berhasil menciptakan pertumbuhan pada tingkat makro. Sebagaimana kita semua sadari di samping pertumbuhan pada tingkat makro pengembangan pada tingkat mikro atau tingkat operasional pun adalah sangat penting. Tugas yang paling sulit yang dihadapi setiap perekonomian ialah bagaimana menjabarkan kekuatan makro yang telah tercapai menjadi suatu kekuatan dan kemampuan operasional yang nasional. Pengembangan lembaga-lembaga yang memadai harus dilihat sebagai bagian dari usaha menciptakan mekanisme atau sarana yang akan memungkinkan perekonomian mengubah kekuatan makro menjadi kemampuan-operasional. Kami berniat untuk memusatkan perhatian pada usaha pengembangan lembaga-lembaga yang memadai. Lebih tegas lagi kami ingin menunjukkan analisa kami kepada lembaga-lembaga yang telah terbukti berhasil dalam melaksanakan tujuan-tujuan pembangunan pemerintah sebagai satu bagian dari usaha-usaha pembangunan menyeluruh. Bukan maksud kami untuk memusatkan perhatian atas atau membicarakan semua segi pembangunan kelembagaan. Sebagaimana yang disebutkan terlebih dahulu kami akan membicarakan hanya satu faktor utama saja (di antara banyak faktor utama lainnya) dari perekonomian-perekonomian nasional yakni pembangunan secara kelembagaan yang wajar dari perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan yang di banyak negara dikenal dengan nama umum *Sogo-Shosha* (perusahaan dagang umum), *handelshuizen*-nya orang Belanda, *trading houses*-nya orang Inggris (seperti misalnya *Jardine Matheson*, *Sime Derby* dan lain sebagainya). Seperti yang disebut terdahulu *Sogo Shosha*lah yang telah berhasil menciptakan struktur kekuasaan yang bersegi lima.

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAGANG UMUM/PERUSAHAAN-PERUSAHAAN PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN

Pertama-tama harus kami jelaskan bahwa kami tidak bermaksud membicarakan perusahaan-perusahaan dagang kecil dalam negeri yang memperdagangkan jumlah hasil atau barang yang terbatas.¹ Kami di sini ingin membicarakan perusahaan-perusahaan dagang umum yang terbukti telah merupakan pemacu-pemacu pembangunan ekonomi dan telah menjadi perantara-perantara dalam pembangunan nasional; perusahaan-perusahaan yang dengan jalan mempersatukan kesanggupan-kesanggupan dan kemampuan-kemampuannya telah memberikan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi nasional negara.

Dalam sejarah kolonial Indonesia dan Malaysia perusahaan-perusahaan dagang ini yang dikenal sebagai sepuluh besar (big ten) Belanda dan perusahaan-perusahaan dagang Inggris dipakai oleh penguasa-penguasa kolonial sebagai suatu mekanisme yang efektif untuk mendominir perekonomian nasional dan juga untuk menjalankan kebijakan-kebijakan mereka. Kita mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan dagang besar ini mengalami kemajuan-kemajuan yang pesat di bawah pembinaan para penguasa kolonial. Pemerintah kolonial tidak akan mempunyai serangkaian lembaga yang memadai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya sekiranya tidak dapat bertumpu pada perusahaan-perusahaan ini. Di pihak lainnya perusahaan-perusahaan ini pun berada dalam kedudukan yang kuat sekali untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan penguasa kolonial. Beberapa dari kebijakan ini menguntungkan "Sepuluh Besar" di Indonesia tetapi ada juga kebijakan-kebijakan yang menguntungkan perekonomian sebagai keseluruhannya.

Usaha pengembangan industri yang dilakukan dalam jumlah kecil di jaman kolonial di samping penciptaan jaringan-jaringan distribusi di seluruh negeri merupakan pola-pola yang

¹ Perusahaan-perusahaan dagang tradisional ini terdapat dalam jumlah ribuan dan pengaruhnya atas pembangunan nasional cukup terasa serta mereka giat dalam pendistribusian barang-barang secara fisik.

masih terlihat hingga sekarang. "Sepuluh Besar" di Indonesia pada tingkat operasionil telah mengembangkan kemampuan-kemampuan yang melibatkan perusahaan-perusahaan itu dalam semua macam fungsi ekonomi. Mereka berkecimpung dalam usaha mempertemukan satuan-satuan produksi sehingga terciptalah persediaan bermacam ragam barang. Hal ini mengantarkan mereka kepada fungsi-fungsi seperti keuangan, perkapalan, asuransi, distribusi, partisipasi dan lain sebagainya. Hasilnya adalah terbentuknya "Sepuluh Besar" dengan semua perusahaan pesertanya, anak-anak perusahaan dan organisasi-organisasi jasa yang kesemuanya telah menjelma menjadi suatu jaringan bisnis yang cukup efektif di seluruh negeri. Hal ini haruslah diakui sebagai salah satu fungsi positif "Sepuluh Besar" yang dalam tahun-tahun setelah Indonesia mengambil alih perusahaan-perusahaan itu telah menjadi berantakan dan akhirnya musnah sama sekali. Dengan dinasionalisirnya perusahaan-perusahaan dagang besar itu maka didirikanlah perusahaan-perusahaan negara. Pengalaman dengan perusahaan-perusahaan negara ini di Indonesia bukanlah sesuatu yang sangat menggembirakan sungguhpun satu atau dua di antaranya telah berhasil bertahan dan memperlihatkan kemampuan tertentu untuk tetap beroperasi. Tetapi kegiatan-kegiatan perusahaan-perusahaan negara ini banyak atau sedikit terbatas pada pelaksanaan program-program pemerintah. Perusahaan-perusahaan dagang yang bergerak di Malaysia dan Singapura diperkenankan berjalan di bawah pengelolaan asing. Hanya baru-baru ini salah satu perusahaan dagang besar yang bergerak di Malaysia dan Singapura yakni Sime Derby telah mengalami perubahan dalam managementnya yakni jika tadinya pimpinan perusahaan didominir oleh pihak asing sekarang perusahaan tersebut dikelola oleh suatu dewan direktur ASEAN hal mana telah terjadi dengan pembelian suatu prosentase saham-sahamnya. Hal ini adalah contoh bagaimana perusahaan-perusahaan dagang besar dengan jaringan-jaringan dan kemampuan-kemampuannya dapat dikuasai dengan jalan memperoleh sebagian yang cukup besar dari saham-sahamnya dan dengan dukungan publik penanam modal. Perusahaan-perusahaan dagang yang beroperasi di Malaysia dan Singapura berada di barisan terdepan dalam memelopori penanaman modal di bidang industri, perkebunan, keagenan barang-barang yang terkenal, pembiayaan perusahaan-perusahaan patungan di

daerah-daerah lain dan sebagainya. Mereka telah menyumbangkan sesuatu kepada pembangunan nasional sungguhpun beberapa di antaranya telah dituduh telah mengalihkan dana-dana ke proyek-proyek penanaman modal di Eropa. Hampir tidak mungkin untuk memperoleh saham-saham dalam jumlah yang cukup besar untuk ikut serta dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan dagang Jepang.

Perusahaan-perusahaan Dagang Jepang

Pengalaman perusahaan-perusahaan dagang Jepang menunjukkan kepada kita suatu contoh yang lebih jelas bagaimana perusahaan-perusahaan dagang ini telah menciptakan suatu mekanisme yang mengidentifisir tujuan-tujuannya sendiri dengan tujuan-tujuan pemerintah. Walaupun tujuan perusahaan-perusahaan ini adalah menjalankan organisasi-organisasinya berdasarkan tujuan mencari laba, tujuan mereka untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat dan bangsa Jepang tercantum pada daftar prioritasnya yang teratas. Pada tingkat operasional perusahaan-perusahaan dagang inilah yang secara langsung menjadi sarana bagi pelaksanaan usaha-usaha mencapai tujuan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Merekalah yang dengan berhasil menjabarkan tujuan-tujuan makro yang ditentukan oleh kebijakan-kebijakan berbagai perdana menteri Jepang menjadi program-program operasional. Mereka menangani segi-segi logistiknya dan memungkinkan berbagai satuan-satuan operasional untuk memperoleh bahan-bahan mentah, alat-alat perlengkapan dan keuangan yang diperlukannya. Seluruh rencana logistik serta pelaksanaannya boleh dikata ditangani oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka pula yang disertai tanggung jawab memasarkan barang-barang jadi yang dihasilkan ke seluruh dunia. Pada taraf yang kemudian mereka pun menangani pembiayaan dan pengorganisasian beribu-ribu perusahaan patungan yang tersebar di seluruh dunia untuk menjamin penyediaan bahan-bahan mentah dan diperolehnya suatu bagian yang layak dan dominan dari pasaran ekspor di seluruh dunia. Di berbagai negara yang sedang berkembang perusahaan-perusahaan dagang ini bertindak sebagai pemacu dan pemrakarsa berbagai macam perusahaan patungan dengan perusahaan-perusahaan industri

dan jasa-jasa Jepang. Mereka pun bergerak dalam hal pemberian biaya dan modal penyertaan kepada partner-partner nasional maupun kepada pihak-pihak yang biasanya membiayai proyek-proyek, untuk penyediaan bahan-bahan mentah yang diimpor dari Jepang. Mereka pun bertindak sebagai pembeli utama hasil-hasil seperti kayu (logs), pasir besi, dan bahan mentah lainnya. Perwakilan-perwakilannya di negara-negara yang sedang berkembang khususnya di Indonesia bertindak sebagai wiraswasta-wiraswasta dalam pengembangan proyek-proyek, kadang-kadang sebagai pihak yang membiayai perdagangan dalam negeri maupun ekspor, sebagai penasihat pemasaran barang-barang di luar negeri, memberikan jasa-jasa konsultan, bertindak sebagai perantara dalam penyelenggaraan tender-tender dan sebagainya.

Singkatnya perusahaan-perusahaan dagang Jepang inilah yang menjabarkan tujuan-tujuan makro menjadi suatu program operasionil dan keberhasilannya melaksanakan program-program ini telah menguntungkan bangsa dan rakyatnya. Sungguhpun memang ada kecaman-kecaman yang dilontarkan terhadap perusahaan-perusahaan dagang ini namun harus diakui bahwa sumbangannya kepada pembangunan ekonomi dan nasional Jepang adalah sangat besar. Merekalah "jenderal-jenderal" yang telah memungkinkan Jepang memenangkan peperangan ekonomi dunia setelah negara itu mengalami kekalahan militer dalam Perang Dunia II. Pelajaran yang dapat kita tarik dari eksistensi perusahaan-perusahaan dagang ini adalah bahwa penjabaran suatu tujuan makro menjadi suatu tujuan operasionil atau mikro mungkin terwujud dengan adanya suatu kelompok satuan-satuan operasionil yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan-tujuan nasional. Mereka mampu mensenyawakan tujuan-tujuan perusahaan dengan tujuan-tujuan nasional. Pelajaran lain yang dapat ditarik dari pengalaman perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang itu adalah bahwa tanpa adanya pengaturan kelembagaan yang memadai kita akan menghadapi sejumlah halangan dalam usaha kita melaksanakan tujuan-tujuan atau target-target makro. Jepang tak mungkin sanggup menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan logistiknya yang sangat besar itu tanpa bantuan dan dukungan perusahaan-perusahaan dagang umum tersebut. Hal yang sama dapat dikata-

kan dalam hal program-program penguasa-penguasa kolonial dahulu di Indonesia, Malaysia dan lain-lain tempat. Dengan kata lain yang hendak digarisbawahi di sini ialah bahwa adanya suatu pengaturan kelembagaan yang memadai yakni adanya sejumlah perusahaan dagang umum yang terorganisir dengan baik dan efisien sebagaimana yang telah dikembangkan di Jepang dan lain-lain negara, harus dipandang sebagai usaha menciptakan syarat-syarat yang perlu untuk memungkinkan pelaksanaan tujuan-tujuan makro secara operasional. Kami menganggap perusahaan-perusahaan dagang umum ini sebagai perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan dalam arti kata yang sebenar-benarnya. Mereka telah membuktikan keefektifannya yang besar di Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Tetapi ini tidak berarti bahwa kita harus menutup mata terhadap beberapa segi negatifnya. Di samping semakin berkembangnya perusahaan-perusahaan ini masyarakat pun telah mendengar atau membaca tentang skandal-skandal seperti peristiwa sogokan Lockheed, praktek penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dan lain-lain sebagainya. Tetapi jika kita harus membuat suatu perbandingan antara segi-segi positif dan segi-segi negatifnya kiranya akan nampak bahwa segi-segi positifnya akan lebih banyak daripada segi-segi negatifnya.

Pembentukan Perusahaan-perusahaan Pertumbuhan dan Pembangunan

Di banyak negara yang sedang berkembang peraturan-peraturan pemerintah tidak membenarkan bergerakanya orang asing dalam sektor-sektor pemasaran dan distribusi yakni di sektor perdagangan. Dengan demikian maka mungkin sekali perwakilan-perwakilan perusahaan-perusahaan dagang umum yang ada di negara-negara tersebut tidak akan dapat beroperasi sebebaskan-bebasnya. Dengan mengingat kemungkinan ini dan kebutuhan akan adanya lembaga-lembaga yang memadai pada taraf operasional atau mikro maka di bawah ini akan kita tinjau kemungkinan-kemungkinan membentuk perusahaan-perusahaan dagang umum.

Perusahaan-perusahaan dagang umum nasional yang mungkin sekali harus diorganisir dan didirikan akan terdiri dari

pengusaha-pengusaha yang bersedia meleburkan organisasi-organisasinya yang berukuran sedang menjadi suatu organisasi yang lebih besar dan kuat. Jika peleburan-peleburan demikian ini dapat terwujud maka sejumlah perusahaan-perusahaan dagang umum akan dapat dibentuk. Dewasa ini ada perusahaan-perusahaan dagang sedang dan terbatas yang bekerja pada tingkat operasionil tetapi ukuran serta kemampuan-kemampuannya masih terlalu terbatas untuk dapat berfungsi secara efektif dan dikembangkan menjadi organisasi-organisasi seperti yang telah ada di Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Malaysia dan Singapura. Kita telah melihat sumbangan yang diberikan tipe perusahaan-perusahaan dagang ini kepada usaha pelaksanaan program-program pada tingkat mikro. Kita telah melihat bahwa kekuatan makro telah dijabarkan menjadi kekuatan mikro dan perkembangan seimbang ini telah membawa keuntungan bagi bangsa, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Saran kami adalah agar perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang yang sekarang beroperasi di negara-negara yang sedang berkembang mempelajari kemungkinan membantu kelompok-kelompok nasional yang bersedia mendirikan atau meleburkan organisasi-organisasinya ke dalam perusahaan-perusahaan dagang umum yang besar. Perusahaan-perusahaan dagang Jepang dapat mengambil prakarsanya dan juga kelompok-kelompok nasional di negara-negara yang sedang berkembang seyogyanya mempelajari kemungkinan-kemungkinan ini. Pembentukan berbagai kelompok perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan nasional tidak akan merupakan suatu tugas yang mudah tetapi kami berpendapat bahwa organisasi-organisasi semacam ini perlu ada pada tingkat operasionil. Hal ini perlu agar kekuatan makro nasional dapat dijabarkan menjadi suatu mekanisme operasionil yang nyata. Perusahaan-perusahaan dagang umum Jepang dapat membantu pengusaha-pengusaha nasional dalam mengorganisir perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan ini. Jika peraturan-peraturan pemerintah tidak membolehkan partisipasi perusahaan-perusahaan dagang umum di dalam perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan, perusahaan-perusahaan dagang umum tersebut dapat diundang untuk bertindak sebagai penasihat-penasihat atau dapat diikutsertakan dalam perjanjian-perjanjian teknik atau kontrak-kontrak management.

IKHTISAR

Kita telah membuat suatu tinjauan singkat tentang bahan bacaan yang terdapat dalam perpustakaan kita dan juga telah membuat suatu analisa singkat tentang beberapa teori dan konsep. Namun mungkin sekali ada tulisan-tulisan lainnya yang tidak kita ketahui dan yang karena itu tidak dapat kita tinjau atau analisa.

Berdasarkan karya penulis-penulis yang telah dikutip di atas dapatlah dikatakan bahwa memang sudah semestinya titik berat penglihatan masing-masing penulis itu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan yang menjadi bidang penulis tersebut masing-masing.

Penulis yang menekuni ekonomi berpendapat bahwa salah satu faktor menentukan yang membantu menentukan peranan wiraswasta adalah faktor permintaan sebagaimana yang tercermin dalam perangsang-perangsang ekonomi yang terdapat dalam perekonomian usaha bebas.

Penulis yang bergerak di bidang psikologi melihat faktor-faktor non-ekonomi sebagai penggerak utama orang yang mengambil risiko dan mengadakan pembaruan-pembaruan. Ia melihat kebutuhan wiraswasta akan pengakuan masyarakat atas keberhasilannya, atas wadah usaha besar yang telah ia bangun sebagai pencerminan suatu keinginan batin untuk memperoleh penghargaan atas peranannya sebagai pengambil risiko dan pembaru dan atas suatu tugas yang telah dilaksanakannya dengan baik.

Penulis yang berpijak pada ilmu sosiologi berpandangan bahwa perangsang yang menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi bukanlah merupakan satu-satunya faktor penentu utama. Menurut dia di dalam masyarakat ada faktor-faktor tertentu lainnya seperti hierarki, kedudukan dan nilai-nilai hidup lainnya yang hingga batas tertentu juga ikut menentukan kegiatan-kegiatan wiraswasta.

Di samping penulis-penulis yang bertitik tolak dari ketiga cabang ilmu pengetahuan tersebut ada juga analisa-analisa seperti yang mengemukakan teori-teori sifat dan kelakuan dari penulis-penulis yang telah menulis tentang bidang-bidang seperti management dan yang mungkin dapat digolongkan dalam salah satu cabang ilmu pengetahuan tersebut di atas.

Tinjauan yang telah kita buat meletakkan tekanan pada kemampuan, kesanggupan dan kebolehan suatu kepribadian yang didorong oleh ciri-ciri watak seperti dorongan ego, kebutuhan menghasilkan prestasi, kepercayaan pada diri sendiri, kebutuhan untuk menang, kebutuhan untuk menunjukkan kebolehan dan sebagainya. Kita telah pula membuat suatu tinjauan tentang karya-karya penulis yang mengagung-agungkan kepribadian termasuk Maccoby yang berpendapat bahwa seorang pemimpin perusahaan yang efektif adalah identik dengan "gamesman". Tekanan secukupnya diberikan di sini pada kepribadian karena kepribadian dianggap mungkin sebagai komponen yang terpenting dalam suatu organisasi yang besar, modern dan rumit.

Kita berpendapat bahwa di dunia sekarang khususnya di negara-negara yang sedang berkembang kita memerlukan tipe wiraswasta yang oleh Maccoby dinamakan "gamesman". Tipe wiraswasta yang baru ini berani menghadapi tantangan-tantangan dalam usaha-usahnya mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam mengembangkan lembaga-lembaga baru dan menundukkan tipe-tipe wiraswasta lainnya yang dikenal sebagai tipe wiraswasta pejuang rimba, pekerja tangan dan orang organisasi. Di negara-negara yang sedang berkembang khususnya terdapat terlalu banyak tipe wiraswasta pejuang rimba (jungle fighter) yang pada dasarnya merupakan tipe destruktif.

Tipe wiraswasta "gamesman" mampu mengerahkan dan mengkombinasikan kelima segi kekuasaan - modal, management, teknologi, jaringan dan pemerintah - dalam usahanya menciptakan lembaga-lembaga yang efisien, efektif dan memadai. Tanpa adanya struktur kekuasaan yang bersegi lima ini tidaklah mungkin menciptakan lembaga-lembaga yang

efektif dan memadai. Lembaga-lembaga baru ini dikenal sebagai perusahaan-perusahaan dagang umum atau dengan nama yang lebih baik lagi yakni perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan. Perusahaan-perusahaan demikian ini telah membawa kemakmuran misalnya kepada Jepang dan juga telah menjadi sarana utama untuk melaksanakan program-program ekonomi dan bisnis Jepang. Berkat adanya perusahaan-perusahaan inilah Jepang sekarang merupakan salah satu raksasa ekonomi di dunia. Korea Selatan, Singapura dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya telah mengikuti contoh Jepang dengan menciptakan lembaga-lembaga yang kuat, efisien dan efektif dalam usaha-usahanya mewujudkan aspirasi-aspirasi nasionalnya demi keuntungan perusahaan-perusahaan nasionalnya.

Dengan membentuk perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan Jepang, Korea Selatan dan Singapura telah berhasil mengerahkan dan mengkombinasikan kelima segi kekuasaan dan sekarang mereka mampu bersaing dalam dunia internasional. Mungkin mereka sekarang sudah tidak lagi membutuhkan perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasi pada Barat tetapi yang diperlukannya sekarang adalah untuk memasuki pasaran-pasaran perusahaan-perusahaan multinasional tersebut. Di pasaran dalam negeri perusahaan-perusahaan multinasional Barat telah dikalahkan dalam persaingan oleh perusahaan-perusahaan multinasional Jepang karena yang disebutkan terdahulu hanya menguasai suatu segitiga kekuasaan yakni modal, teknologi dan management sedangkan yang tersebut belakangan mempunyai suatu struktur kekuasaan yang bersegi lima. Perusahaan multinasional Jepang mempunyai dua segi kekuasaan yang tidak dimiliki perusahaan-perusahaan Barat yakni jaringan-jaringan internasional dan dukungan pemerintah sepenuhnya.

Kita melihat wiraswasta di negara-negara yang sedang berkembang sebagai perintis, mesin, lokomotif yang membantu merealisasikan aspirasi-aspirasi pemerintah untuk menciptakan suatu bangsa yang lebih baik, suatu bangsa yang lebih makmur di mana kekayaan terbagi-bagi secara adil. Dalam hal ini suatu kesadaran yang tinggi akan suatu tugas yang harus diemban

(sense of mission) adalah penting sekali. Kita melihat bahwa peranannya adalah menciptakan perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan atau perusahaan-perusahaan dagang umum agar negara-negara yang sedang berkembang menjadi mampu menghadapi perusahaan-perusahaan multinasional Jepang dengan struktur kekuasaan yang bersegi lima dan perusahaan-perusahaan multinasional Barat dengan kekuasaannya yang bersegi tiga itu. Wiraswasta, sungguhpun ia seorang genius, tidak akan mampu menghadapi dunia yang penuh persaingan semacam itu tanpa bantuan perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan dengan segala cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya. Korea Selatan misalnya dalam waktu yang kurang dari satu dasawarsa telah menciptakan tipe wiraswasta "gamesman" sendiri dengan bantuan perusahaan-perusahaan dagang umumnya.

Selain memberikan peluang-peluang kepada kelompok-kelompok wiraswasta untuk melakukan tugasnya dengan baik menurut hemat kami negara-negara yang sedang berkembang harus mengarahkan usaha-usahanya kepada penciptaan lembaga-lembaga yang lebih efektif — perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan. Perusahaan dagang umum, jika dapat dibentuk, diperlukan demi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang sedang berkembang sehingga kekuatan yang diperoleh pada tingkat makro dapat dijabarkan menjadi suatu mekanisme yang efektif dan efisien pada tingkat mikro. Pada tingkat operasional diperlukan suatu mekanisme yang besar, kuat, efektif, berguna dan berpengaruh yang dapat memberikan ruang gerak yang cukup luas bagi tipe wiraswasta yang dinamakan "gamesman" atau pemimpin perusahaan. Pemimpin-pemimpin perusahaan inilah tipe wiraswasta yang seharusnya disertai kepemimpinan atas perusahaan-perusahaan pertumbuhan dan pembangunan.

PENGARUH LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP MASALAH PEMBANGUNAN DI DALAM NEGERI*

O. Sutomo ROESNADI

Dalam usia 32 tahun sebagai negara merdeka dan berdaulat, Indonesia telah mengalami pasang surut dalam pergaulan hubungan internasionalnya. Jika diukur menurut perjalanan umur manusia, usia tersebut telah cukup menunjukkan kedewasaan, di mana ia dapat mengambil pengalaman-pengalaman yang baik atau yang buruk selama jangka waktu tersebut. Sehingga sebagai suatu bangsa kita sudah seharusnya mampu menilai mana yang bermanfaat bagi kepentingan nasional, mana yang kurang atau tidak bermanfaat, dan mana pula yang dapat disumbangkan kepada keharmonisan kerja sama internasional.

Sebagai bangsa yang sudah cukup dewasa, Indonesia sudah cukup banyak berkecimpung dalam berbagai masalah internasional yang menyangkut secara langsung atau tidak langsung kepentingan nasionalnya. Bahkan kalau diingat kembali, lahirnya negara Republik Indonesia-pun telah merupakan masalah internasional yang mendapat perhatian negara-negara di dunia, terutama yang telah menjadi anggota PBB ketika itu. Dalam melibatkan diri kita terhadap masalah-masalah internasional tersebut, kadang-kadang kita mendapat sanjungan, pujian atau dukungan, misalnya dalam merebut kembali kemerdekaan kita dari Belanda antara tahun 1945-1949, dan Irian Barat antara tahun 1950-1963. Tetapi tidak jarang pula kita mendapat ejekan, hinaan, dan tidak mendapat dukungan karena sikap kita terha-

* Prasaran disampaikan pada Simposium Pokok-pokok mengenai Pembangunan Nasional di Jakarta, tanggal 26 Agustus 1977.

dap masalah-masalah tertentu tidak selalu serasi dengan kepentingan internasional, misalnya masalah konfrontasi dengan Malaysia dan masalah Timor Timur.

Dunia yang kita diami dan kita hadapi dewasa ini penuh dengan tantangan dan seribu macam masalah yang terus menerus berada di sekitar kita tanpa ada putus-putusnya. Sebagai negara yang sejak semula hampir tidak pernah absen dalam kegiatan-kegiatan internasional, maka kita tidak akan membiarkan setiap masalah dunia lewat begitu saja di depan kita tanpa perhatian.

Tarik-menariknya antara kekuatan-kekuatan dalam negeri dan kekuatan-kekuatan internasional mungkin akan menyebabkan kita terperosok, kalau kita tidak betul-betul membuat perhitungan yang matang dan teliti. Untuk keluar dari daya lingkaran kekuatan yang saling tarik-menarik tersebut tidak mungkin lagi, karena kita telah merupakan salah satu bagian dari arus kekuatan-kekuatan dunia pula.

Hukum alam yang mengatakan bahwa barang siapa yang kuat ia akan tetap hidup, sebetulnya masih tetap berlaku sampai sekarang ini. Menghadapi persoalan yang demikian tajam dan beraneka-ragam dalam politik internasional, tidaklah heran jikalau terdapat sementara anggapan yang menyuarakan apatisisme, bahwa sebaiknya Indonesia lebih memperketat dirinya untuk memberi perlindungan terhadap kepentingan nasionalnya. Ada yang tidak menginginkan hadirnya pengusaha-pengusaha/penanam-penanam modal asing, karena hal ini dianggap dapat memojokkan kepentingan pengusaha-pengusaha nasional Indonesia yang pada umumnya masih lemah. Ada yang tidak mau dengan kehadiran bantuan asing, karena hal itu akan merendahkan bangsa dan negara Indonesia dalam martabat internasional. Ada juga yang begitu takut dan khawatir untuk peningkatan hubungan dengan negara-negara komunis, karena hal itu dipandang akan menggawatkan situasi pertahanan dan keamanan dalam negeri. Demikian juga halnya terlalu rapatnya atau terlalu banyaknya hubungan kita dengan negara-negara dan orang-orang asing dipandang akan melemahkan aparatur-aparatur negara kita dan dipandang pula sebagai salah satu kemungkinan untuk sumber subversif.

Dalam menelaah beberapa masalah tersebut di atas, tentu kita ingin mengetahui sampai berapa jauhkah kita dapat menahan pengaruh-pengaruh internasional yang merugikan bangsa dan negara kita? Sementara itu, apakah telah terpikirkan pula oleh kita untuk mengkaji masalah-masalah hubungan internasional dengan lebih mendalam, yaitu tidak saja melihat permasalahan secara umum, tetapi juga melihat setiap kemungkinan yang akan terjadi dari masalah-masalah tersebut sampai sedetail-detailnya? Berapa buah alternatifkah dapat diambil dari pemecahan setiap masalah tersebut, sehingga kita tidak macet di tengah jalan, apabila sekiranya salah satu alternatif itu tidak dapat digunakan?

I

Pada masa jaya-jayanya Indonesia memainkan peranan politik luar negeri bebas aktif dari tahun limapuluhan sampai tahun enampuluhan, dengan cekatan dan trampil Indonesia dapat memperoleh bantuan dan dukungan dari salah satu blok Barat atau blok Timur atau dari kedua-duanya, apakah itu berupa bantuan moral atau materiil yang secara langsung melibatkan kepentingan nasional kita. Menjelang tahun 1965 intensitas tersebut menurun, karena tidak ada perimbangan lagi di mana politik luar negeri bebas aktif kita cenderung untuk berkiblat ke negara-negara komunis. Sebaliknya pula terjadi pada dasawarsa terakhir ini, politik luar negeri bebas aktif Indonesia lebih banyak diteropong oleh dunia internasional sebagai condong ke Barat.

Sikap yang demikian mungkin akan lebih banyak memberi keuntungan dalam waktu dekat, tetapi sebaliknya mungkin akan lebih banyak menimbulkan kerugian dalam waktu jangka panjang. Masih segar ingatan kita akan pengalaman pahit setelah tahun 1966, di mana kita sukar sekali untuk mendapatkan spareparts pesawat terbang dan kapal perang buatan Uni Sovyet, karena hubungan kita dengan negara tersebut menurun, dan Indonesia tidak mampu lagi memberikan keseimbangan pada politik luar negeri bebas aktifnya. Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa dengan politik bebas aktif Indonesia harus selalu mengandalkan belas kasihan negara-negara lain, terutama negara-negara

besar, atau hanya untuk menyenangkan mereka supaya diri kita merasa aman. Saya yakin bahwa para formulator dan perintis dari pada politik luar negeri bebas aktif Indonesia menghendaki agar kita lebih percaya pada diri sendiri sehingga dengan bebas kita dapat ikut memecahkan berbagai masalah internasional yang langsung atau tidak secara langsung mengenai kepentingan Indonesia. Sehingga dengan berpijak pada politik luar negeri bebas aktif akan lebih banyak memberi dorongan dan keleluasaan kita untuk bergerak di dalam percaturan politik internasional.

Meskipun demikian kita sadari bahwa di dalam dunia yang semakin saling bergantung satu sama lainnya, kita tidak bisa lagi untuk melepaskan ketergantungan secara mutlak. Seandainya-pun kita sudah mampu membuat semua barang yang kita perlukan, kita tidak akan dapat mempergunakan barang-barang itu semuanya, dan sebagian harus dilempar ke pasaran internasional. Karena pada suatu waktu Indonesia sudah akan dapat memenuhi sebagian besar bahan-bahan baku dan alat-alat industri serta onderdil-onderdil mesin, sehingga sebelum akhir dekade ini, Indonesia diharapkan sudah akan memproduksi beberapa jenis barang secara full manufacturing, yang pada akhirnya sebagian dari barang-barang jadi itu harus diekspor.

Dalam rangka pemikiran inilah maka akan sangat penting kiranya meningkatkan hubungan dengan setiap negara di dunia, sehingga di samping menghindarkan faktor-faktor atau pengaruh-pengaruh negatif dari hubungan tersebut, kita harus pula dapat menciptakan hal-hal yang positif demi untuk kepentingan nasional kita sendiri.

Akibat melimpah-limpahnya petro-dollar ke beberapa negara Timur Tengah misalnya, negara-negara industri maju, bahkan juga India saling berlomba untuk mencari pasaran di kawasan tersebut. Tidak kurang pentingnya untuk diperhatikan bahwa di antara negara-negara yang termasuk berkembangpun di samping India, misalnya Taiwan, Korea Selatan dan Thailand juga berlomba-lomba untuk mengirim tenaga-tenaga kerja mereka ke Timur Tengah. Meskipun hubungan kebudayaan, terutama dalam bidang agama sangat erat antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, tetapi ternyata hubungan

lainnya dalam bidang ekonomi, politik dan sosial dianggap enteng, sehingga kemanfaatan hubungan kurang sekali. Kita harus menyadari bahwa negara-negara Timur Tengah umumnya tidak banyak memerlukan barang-barang komoditi yang berbentuk kayu gelondongan, atau rempah-rempah atau bahan baku lainnya, tetapi mungkin mereka lebih tertarik untuk barang-barang elektronik, bahan-bahan baku industri, mesin-mesin industri dan sebagainya.

Wilayah Afrika yang demikian luas juga belum mendapat perhatian kita sepenuhnya, yang pada suatu saat kita akan berkepentingan dengan wilayah tersebut karena potensi pemasaran yang akan semakin berkembang di kemudian hari untuk barang-barang jadi atau komoditi-komoditi lainnya dari Indonesia.

Tidak kalah pentingnya juga hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara maju, baik di blok Barat maupun di blok Timur. Mulai dari sekarang harus dijajagi segala kemungkinan untuk dapat memasarkan *manufactured goods* dari Indonesia ke negara-negara tersebut, di samping barang-barang komoditi tradisional lainnya.

Perencanaan jangka panjang dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara maju, serta negara-negara berkembang di seluruh dunia perlu mendapat prioritas tinggi, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi barang-barang ekspor utama Indonesia, terutama minyak bumi atau kayu mungkin akan semakin menipis. Dalam hubungan ini pula harus sudah kita mulai pikirkan dengan serius, barang-barang jenis mana lagi yang dapat kita kembangkan untuk pasaran internasional, di samping barang-barang komoditi tradisional, barang-barang jadi dan produk-produk lainnya. Misalnya hasil-hasil kerajinan kita belum dapat bersaing di pasaran internasional, dibandingkan dengan hasil-hasil kerajinan dari India dan Pilipina.

Tidak kalah pentingnya untuk pagi-pagi sekali Indonesia juga memikirkan bahan pengganti energi minyak bumi sekarang dengan bahan energi lain yang ada di dalam negeri. Kalau tidak,

dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin Indonesia akan menjadi negara pengimpor bahan energi dari negara lain, apakah itu berbentuk minyak bumi, nuklir dan lain sebagainya.

. II

Tidak dapat disangkal bahwa setiap hubungan yang akan kita jalin dengan negara-negara di dunia, apakah itu hubungan bilateral atau multilateral seperti halnya dengan negara-negara IGGI atau dengan negara-negara investor, akan mempunyai pengaruh yang baik atau buruk. Tidak pula kita menutup mata akan adanya kenyataan dalam hubungan internasional, terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan bahwa pihak yang satu akan selalu berusaha memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pihak yang lainnya, misalnya neraca perdagangannya harus diusahakan agar selalu surplus.

Di sini pula kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk dapat menahan sumber-sumber pengaruh yang dapat menjerumuskan kepada faktor-faktor negatif. Dalam hubungan internasional pada dasarnya berlaku pula prinsip antara penjual dan pembeli. Seorang pembeli yang bijaksana akan dapat memilih barang-barang yang demikian banyak ditawarkan, dan barang yang akan kita ambil terbatas hanya pada barang-barang yang betul-betul diperlukan dan dengan harga yang dapat dijangkaunya.

Sebagai bangsa yang sudah dewasa kitapun seharusnya sudah memperhatikan siasat ini. Barang-barang yang sifatnya terlalu konsumtif dan mewah dan sudah mampu diproduksi di dalam negeri sendiri, sebaiknya dibatasi atau dihapuskan sama-sekali pengimporannya. Sehingga dengan demikian substitusi impor harus betul-betul dijalankan dengan konsekwen. Dengan demikian kita harus berhati-hati, sehingga demi untuk ikut memajukan industri dalam negeri kita batasi keinginan kita untuk barang-barang impor yang mewah. Seperti telah dibahas sebelumnya demi untuk kelancaran hubungan dengan dunia internasional, pengimporan barang secara terbatas masih perlu, karena selain memberikan perangsang kepada industri dalam negeri untuk membuat barang-barang yang mempunyai kualitas

tinggi, juga pada akhirnya sebagian dari pada barang-barang yang kita buat harus diekspor pula.

Seleksi kebutuhan barang-barang tersebut tidak terbatas hanya sampai di situ saja, tetapi juga pada kemampuan kita untuk memilih teknologi yang betul-betul memadai lagi kebutuhan kita, yang sesuai dengan kondisi yang ada di dalam negeri. Pengimporan teknologi tinggi yang mungkin sesuai dengan jangka panjang, tetapi belum tentu sesuai untuk jangka pendek dan menengah, sehingga demikian harus diatasi. Kita harus pandai mengkombinasikan dengan kenyataan tenaga-tenaga kerja yang masih banyak menganggur, sehingga prioritas kepada proyek-proyek padat karya selalu harus diusahakan untuk ditingkatkan. Sepatutnya kita jangan lekas tergoda oleh laba yang cepat atau besar yang akan diperoleh jika seandainya si penanam modal memaksakan untuk menciptakan proyek padat modal.

Peranan supervisi atau kontrol dari pihak pemerintah terhadap pengimporan teknologi tinggi demikian penting, karena tidak jarang terjadi bahwa suatu proyek dijanjikan sebagai proyek padat karya, tetapi ternyata pelaksanaannya sebagai proyek padat modal. Dalam hal ini Indonesia sebagai tuan rumah harus dapat bertindak tegas, dan jangan lekas menyerah karena hanya gertakan dari pihak negara investor yang mungkin juga negara itu negara donor.

Demikian juga halnya dengan penggunaan tenaga asing dan pelaksanaan Indonesiasi suatu perusahaan joint venture atau lainnya yang patut pula mendapat pengawasan lebih ketat. Kita memang tidak boleh menutup mata bahwa dalam beberapa bidang tertentu kita memerlukan keahlian tenaga-tenaga asing. Jadi yang dituju oleh kita bukan secara apriori menentang kehadiran tenaga asing di sini, tetapi harus mencari keseimbangan mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Karena tujuan lain yang harus dicapai, ialah di samping mampu mengerjakan oleh para ahli Indonesia sendiri, pada suatu saat Indonesia mungkin harus mengekspor tenaga-tenaga ahli atau yang kurang ahli keluar negeri, terutama ke negara-negara yang sama-sama masih berkembang.

Apa yang kita lakukan pada taraf sekarang dalam pengeks-
poran tenaga kerja dan penempatan ahli Indonesia keluar negeri
masih pada skala kecil. Tenaga-tenaga ahli Indonesia di lemba-
ga-lembaga organisasi internasionalpun masih sedikit jumlah-
nya. Memang pada lain pihak terdapat beberapa argumentasi,
baik yang dikemukakan oleh negara-negara berkembang mau-
pun negara-negara maju, bahwa mengalirnya tenaga-tenaga ahli
keluar negeri akan mengakibatkan brain drain. Tetapi kita harus
pula melihat kenyataan bahwa tenaga-tenaga kerja yang tidak
terdidik, bahkan tenaga-tenaga kerja yang terdidik yang meng-
anggur di dalam negeri tidak sedikit jumlahnya.

III

Komunikasi internasional yang semakin cepat dan maju
berkat teknologi baru dan modern yang senantiasa diketemukan
orang, menyebabkan pengaruh lingkungan internasional terha-
dap sesuatu negara tidak dapat dielakkan lagi. Terutama bagi
Indonesia yang merupakan negara maritim, yang dikatakan pula
sebagai negara yang berada dalam posisi silang, maka Indonesia
akan lebih terbuka terhadap pengaruh lingkungan internasional
tersebut. Apakah pengaruh internasional itu akan terus berada di
sekitar kita, sepanjang kekayaan alam Indonesia masih berlim-
pah-limpah, atau pengaruh internasional itu dengan sendirinya
akan menyingkir begitu kekayaan kita habis, masih sukar untuk
diramalkan.

Tidak cukup kiranya bagi kita sekedar hanya merasa kha-
watir akan akibat pengaruh lingkungan internasional tersebut
terhadap perkembangan politik pembangunan dalam negeri.
Kita harus berbuat lebih dari pada hanya merasa khawatir saja.

Memang masalah-masalah lingkungan internasional,
misalnya negara-negara donor, kehadiran modal asing, pemikir-
an dan program politik negara-negara Barat, komunisme dan
Dunia Ketiga, sampai pada strategi dan model pembangunan
negara-negara komunis terutama di Indo Cina, jelas secara lang-
sung atau tidak langsung akan mempengaruhi politik pema-
ngunan dalam negeri Indonesia. Yang menjadi pokok permasa-

lahan yang kita hadapi sekarang seberapa jauhkah kemampuan kita untuk menahan atau membendung pengaruh-pengaruh lingkungan internasional yang demikian beraneka ragamnya itu, dan sampai berapa jauh pula kita mawas diri dan berani mengoreksi kelemahan-kelemahan kita sendiri. Sebab dengan mengetahui akan kelemahan-kelemahan kita sendiri dan secara terbuka kita telaah dan kita pecahkan bersama, maka unsur-unsur yang akan menunjang ketahanan nasional kita akan lebih meningkat.

Masalah-masalah internasional maupun masalah domestik yang diperkirakan akan mempunyai pengaruh dalam politik internasional, tidaklah cukup jika hanya kita serahkan pada diplomat professionil kita di Departemen Luar Negeri, tetapi juga harus merupakan masalah yang harus dikaji bersama oleh kita semua sesuai dengan keahlian masing-masing. Memang dalam hal ini harus pula kita sadari, bahwa sebetulnya hanya terdapat beberapa gelintir kaum elite saja yang berhak memutuskan apa yang baik dan apa yang tidak baik bagi kebijaksanaan politik luar negeri kita. Tetapi tidak ada salahnya bagi para kaum elite ini, jika kepada mereka diberikan feedback atau umpan balik sebanyak mungkin, diminta atau tidak diminta, sehingga kaum elite kita itu dapat memiliki beberapa macam alternatif dalam membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan-nya.

Jika diteliti secara mendalam, pengetahuan kita terhadap masalah-masalah internasional tertentu masih terlalu lemah atau terlalu bersifat generalisasi. Kita banyak mengetahui secara umum tentang negara-negara donor IGGI, tetapi mengetahui secara mendetail masing-masing negara donor, seperti AS, Jepang, Eropa Barat, Australia dan lain-lain, dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, militer masih sedikit atau hampir tidak ada ahlinya. Dengan memperdalam dan secara terperinci kita mempelajari sesuatu masalah, maka kita akan lihat bahwa negara-negara yang bagaimanapun ampuhnya akan selalu terdapat titik-titik lemahnya. Misalnya mengenai komunis Indo Cina yang selalu kita khawatir dan takut, yaitu bagaimana kalau mereka mengadakan serangan terbuka kepada negara-negara ASEAN, dan bagaimana pula kalau strategi dan model pemba-

ngunan mereka lebih berhasil dari model-model Repelita-Repelita Indonesia atau ASEAN lainnya.

Sebegitu jauh kita pada umumnya hanya merasa curiga dan khawatir pada negara-negara komunis Indo Cina, begitu pula mempelajari masalah-masalah tersebut secara agak mendalam mungkin hanya terbatas di lingkungan Deplu, atau lembaga-lembaga yang ada di lingkungan Hankam, seperti Lemhannas, Seskoad atau satu dua buah lembaga lainnya di luar pemerintahan. Dengan sendirinya kita tidak bisa mengharapkan bahwa akan terdapat pemecahan permasalahan secara menyeluruh atau mempunyai beberapa alternatif penyelesaian masalah.

Kiranya sangat baik untuk dipikirkan bahwa masalah-masalah internasional semacam itu, apakah mengenai komunis di Indo Cina, negara-negara donor IGGI, kekuatan politik Dunia Ketiga, dan sebagainya, tidak saja menjadi bidang monopoli beberapa lembaga atau pejabat pemerintah tertentu, tetapi juga melembaga dalam masyarakat itu sendiri, terutama lembaga-lembaga perguruan tinggi. Mungkin sangat ideal jika didirikan pusat-pusat pengkajian internasional, untuk menangani masalah-masalah Cina, komunis, negara-negara Barat, Dunia Ketiga, Timur Tengah secara betul-betul mendalam, tidak hanya terbatas pada satu atau dua macam masalah dari setiap negara itu, tetapi juga secara keseluruhan, yang meliputi politik, ekonomi, sosial, budaya, militer, dan bahasa.

Tentunya kita tidak terbatas hanya mempelajari sekelompok negara-negara besar tertentu yang kebetulan mempunyai kepentingan dengan Indonesia, atau diperkirakan akan membahayakan Indonesia, tetapi juga kita harus selalu menaruh perhatian pada setiap masalah atau kemungkinan masalah yang akan timbul yang diperkirakan akan melibatkan kepentingan Indonesia di hari-hari yang akan datang. Sebab dengan mengadakan persiapan yang matang dalam menghadapi sesuatu masalah, maka kita akan lebih mantap dalam menangani masalah itu sendiri. Misalnya mengenai masalah Samudera Hindia, kepulauan Cocos dan Christmas, kepulauan di sekitar lautan Pasifik, negara-negara Afrika Hitam, dan tentu tidak kalah pentingnya pula negara-negara ASEAN sendiri, yang seolah-olah kita tahu

banyak mengenai mereka, tetapi sebetulnya pengetahuan kita juga tipis. Saya kira baru Singapura-lah yang akan memulai merintis mengadakan pengkajian masalah-masalah ASEAN secara mendalam.

IV

Masalah-masalah lain yang tidak kalah pentingnya dan kadang-kadang dieksploitir oleh kekuatan-kekuatan internasional ialah masalah-masalah yang sebetulnya ada di tengah-tengah kita, tetapi selalu kita berusaha untuk menutup-nutupinya, karena beberapa pertimbangan penguasa misalnya karena alasan security dan persatuan bangsa. Namun demikian, setiap masalah yang ada di dalam masyarakat harus segera ditangani, kalau tidak, tangan-tangan jahil internasional akan selalu mencoba mempengaruhinya.

Dalam hubungan ini patut saya sebutkan beberapa masalah yang cukup penting untuk mendapatkan perhatian kita semua, antara lain masalah minoritas Cina dan suku terasing, Irian Jaya dengan OPM-nya, Timor Timur dengan Fretilin-nya, dan juga tahanan politik dalam negeri yang pada umumnya orang-orang Indonesia yang terlibat dalam kudeta G-30-S/PKI. Beruntung bagi negara Indonesia yang sedikit sekali mempunyai perbatasan darat internasional, dibandingkan dengan Thailand, India, Pakistan atau Burma. Meskipun demikian, perbatasan darat internasional yang ada di Kalimantan Indonesia dan Kalimantan Malaysia, ataupun antara Irian Jaya dan Papua Nugini, akan tetap merupakan kawasan-kawasan yang cukup rawan di hari sekarang dan di hari-hari yang akan datang. Bekas-bekas anggota OPM akan selalu merupakan sumber penghasut bagi warga kita lainnya yang ada di Irian Jaya, dan jika kemajuan pembangunan di Papua Nugini lebih cepat dalam mengembangkan potensi orang Nugini, maka hal ini akan merupakan godaan bagi warga kita di Irian Jaya yang pada umumnya masih dalam taraf kehidupan yang sederhana.

Kita selalu mencanangkan ke dunia luar maupun ke dalam negeri, bahwa kita hanya mempunyai satu bangsa ialah bangsa Indonesia, dan kita tidak mengenal masalah minoritas apa lagi

yang namanya suku terasing. Mungkin perlu juga dipikirkan agar untuk suku-suku terasing tertentu diberi semacam keistimewaan, sehingga mereka tidak jauh tertinggal oleh suku-suku lainnya yang lebih maju, misalnya oleh bangsa Indonesia yang berasal dari Jawa dan Sumatera. Kesempatan terutama harus diberikan dalam bidang pendidikan, memasuki lembaga-lembaga pendidikan seperti AKABRI, dan juga menempatkan mereka di Departemen-departemen Pusat.

Dalam menangani masalah suku terasing, dan terutama warga kita di Irian Jaya dan Timor Timur kita harus bertindak sangat bijaksana. Dalam hubungan ini tentunya amat penting meningkatkan hubungan yang lebih mendalam antara kita dan negara-negara Afrika Hitam. Pengalaman-pengalaman masa lalu telah memberi pelajaran pada Indonesia bahwa sesuatu hubungan persahabatan dengan negara manapun tidak boleh dianggap enteng. Melainkan hubungan itu harus selalu ditingkatkan dan dipelihara secara terus menerus, jika kita ingin memperoleh hasil yang maksimum dari hubungan tersebut. Saya kira masih segar dalam ingatan kita akan Konperensi Negara-negara Non-Aligned di Lusaka tahun 1970, demikian juga dukungan yang tipis dari negara-negara Afrika Hitam terhadap Pepera Irian Barat dan Integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Masalah minoritas yang tidak kalah menarik untuk selalu diperhatikan ialah masalah Cina di Indonesia. Beberapa usaha pemerintah untuk mengasimilasikan orang-orang keturunan *Cina* ke dalam bangsa Indonesia, sehingga kita tidak akan kenal lagi apa yang dinamakan minoritas golongan Cina tersebut. Masalah inipun tidak seyogyanya kita tutup-tutupi, tetapi harus dibicarakan secara terbuka oleh kita semua, sehingga kita harus mampu mengetahui sampai seberapa jauhkah masalah minoritas Cina itu masih merupakan hambatan bagi pembinaan kesatuan bangsa, dan sampai berapa jauhkah telah mencapai keberhasilan. Dalam hubungan ini pula pentingnya pengkajian masalah-masalah Cina (*Chinese Studies*) harus lebih dikembangkan, tidak saja oleh beberapa lembaga perguruan tinggi atau Hankam yang ada di Jakarta, tetapi juga dianjurkan misalnya untuk dipelajari oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi lainnya. Sehingga dalam

mengkaji masalah Cina, tidak saja hanya terbatas pada mempelajari geografi, sejarah, bahasa - budaya, sosial, ekonomi, politik RRC, tetapi juga kaum Cina perantauan yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia sendiri.

Hal ini sangat perlu saya kemukakan, berhubung dengan kemungkinan adanya campur tangan internasional dalam masalah minoritas Cina di Indonesia. Saya kira tidak terlalu jauh untuk melihat bukti yang nyata ialah masalah Muslim di Pilipina Selatan, yang karena tidak bijaksananya pemerintah pusat di Manila, maka masalah Muslim yang sebetulnya merupakan masalah domestik Pilipina telah berkembang menjadi masalah internasional, di mana beberapa negara tertentu campur tangan di dalamnya.

Masalah lainnya yang selalu mengganggu kita ialah masalah tahanan politik bekas PKI, yang senantiasa menjadi bulan-bulanan kekuatan-kekuatan internasional tertentu. Tidak cukup kiranya untuk mengkikis gangguan-gangguan tersebut, apakah berasal dari Amnesty International, atautkah dari negara-negara komunis, atau dari kaum radikal kiri di negara-negara Barat, harus dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah, misalnya Deplu, atau Deppen atau Departemen lainnya yang memberi pernyataan atau penjelasan pada dunia luar bahwa tahanan politik itu bukan merupakan masalah bagi Indonesia. Dan juga mungkin dengan alasan kuat dari kita bahwa masalah itu adalah merupakan masalah domestik Indonesia, sehingga negara lain tidak berhak campur tangan. Untuk menangani masalah tersebut mungkin perlu dikerahkan seluruh potensi kita semua, apakah itu diplomat-diplomat yang tergabung dalam Deplu, atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri untuk memberi penjelasan atau propaganda kepada dunia luar, seperti halnya telah dilakukan pada waktu kita memperjuangkan Irian Barat.

Yang juga tidak kalah menariknya untuk dipermasalahkan di sini ialah mengenai Wawasan Nusantara. Hal inipun sebaiknya lebih melembaga dalam masyarakat Indonesia, sehingga yang tahu betul permasalahannya tidak hanya terbatas pada anggota-anggota delegasi Indonesia dan Departemen Luar Negeri yang

ikut serta dalam Konperensi Hukum Laut Internasional, terutama untuk memperjuangkan Wawasan Nusantara kita, tetapi juga harus lebih tersebar luas di kalangan anggota masyarakat kita. Sehingga mungkin dari anggota masyarakat lainnya, yang mungkin profesinya dalam bidang politik, ekonomi, sosiologi, dan lainnya akan dapat memberikan sumbangan lebih konkrit dalam memperjuangkan Wawasan Nusantara tersebut dalam forum-forum internasional.

Memang untuk memperjuangkan berbagai macam kepentingan Indonesia di dalam forum internasional dibutuhkan tidak saja potensi-potensi yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintahan, tetapi juga dari seluruh anggota masyarakat terutama kaum cendekiawan. Kita melihat kenyataan bahwa pengetahuan kita mengenai bermacam-macam masalah internasional tersebut masih didominasi oleh bangsa-bangsa asing pula, demikian pula halnya masalah-masalah mengenai Indonesia sendiri. Meskipun secara sedikit-sedikit sudah mulai terlihat beberapa buku atau tulisan yang ditulis oleh sementara kaum cendekiawan Indonesia, tetapi ternyata masih sangat terbatas untuk dapat menyaingi kekuatan-kekuatan internasional dalam bidang ini.

Sebagai akhir tulisan ini saya hanya ingin menandakan bahwa masalah-masalah lingkungan internasional yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi Indonesia, hanya mungkin dapat dibendung, dikurangi, atau dihapuskan sama sekali, jika kita sungguh-sungguh menghayati, mendalami, dan mempelajari persoalan itu sendiri secara terperinci dari berbagai-bagai macam sudut. Sehingga dengan demikian akan dapat dihasilkan juga berbagai macam alternatif terhadap pemecahan masalah-masalah internasional tersebut.

DAFTAR PUBLIKASI — CSIS

I. SERI BUKU

- | | |
|--|---------------|
| 1. Some Basic Thoughts on the Acceleration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO | a Rp. 1.250,— |
| 2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO | |
| 3. Dua pemikiran tentang Pertahanan Keamanan dan Strategi Nasional, Daed JOESOEF | a Rp. 1.000,— |
| 4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation | |
| 5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO | a Rp. 500,— |
| 6. Persoalan Masa Kini: Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM | a Rp. 1.500,— |
| 7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO | a Rp. 1.000,— |
| 8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM | a Rp. 500,— |
| 9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 | a Rp. 1.750,— |
| 10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM | a Rp. 1.000,— |
| 11. Regionalism in Southeast Asia | a Rp. 1.250,— |
| 12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO | a Rp. 400,— |
| 13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional | a Rp. 2.000,— |
| 14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) | a Rp. 1.200,— |
| 15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) | a Rp. 300,— |
| 16. Self Reliance and National Resilience | a Rp. 1.250,— |
| 17. Second Indonesian — Japanese Conference | a Rp. 1.500,— |
| 18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 | a Rp. 4.000,— |
| 19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 | a Rp. 5.000,— |
| 20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia | a Rp. 2.000,— |
| 21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia | a Rp. 1.500,— |
| 22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM | a Rp. 3.000,— |
| 23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO | a Rp. 1.500,— |
| 24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO | a Rp. 1.500,— |
| 25. Southeast Asia and the World of Tomorrow | a Rp. 3.000,— |
| 26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO | a Rp. 750,— |
| 27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 | a Rp. 5.000,— |
| 28. P-4 and GBHN (bhs Inggris) | a Rp. 600,— |

II. TERBITAN BERKALA

- | | | |
|--|-------------|------------------------|
| 1. RINGKASAN PERISTIWA
(terbit setiap 2 minggu) | a Rp. 350,— | Rp. 10.000,— per tahun |
| 2. ANALISA
(terbit setiap bulan) | a Rp. 700,— | Rp. 8.000,— per tahun |
| 3. MONOGRAF | a Rp. 700,— | |
| 4. THE INDONESIAN QUARTERLY
(terbit setiap 3 bulan) | a Rp. 800,— | Rp. 3.200,— per tahun |

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim $\pm 15\%$; dialamatkan pada: CSIS, Biro Publikasi, Jalan Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat, telepon 349489

DAFTAR ISI ANALISA

TAHUN V, 1976

1. EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON

- N. ARSJAD, *Ciri-ciri Ekonomi Dunia Dasawarsa Tahun-tahun Tujuh puluhan*
- N. ARSJAD, *Kingston System: Sistem Moneter Internasional Baru*

2. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I)

- J. PANGLAYKIM, *Kerjasama Ekonomi — Perdagangan ASEAN Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade Area*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *ASEAN Sesudah KTT*

3. ASEAN: PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (II)

- J. PANGLAYKIM, *Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN: Suatu Kemungkinan Bentuk Kerjasama Ekonomi ASEAN*
- J. PANGLAYKIM, *Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya*
- Daoed JOESOEf, *Renungan Mengenai Masalah Free Trade*

4. EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI

- Pintor SIMANDJUNTAK, *Strategi Kebutuhan Pokok*
- Tjipto SOEMARTONO, *Peranan Profesi Kedokteran dalam Menunjang Proses Akselerasi Modernisasi*
- Daoed JOESOEf, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*

5. BUDAYA DAN PENDIDIKAN

- A.M.W. PRANARKA, *Merintis Jalan menuju Tata Dunia Yang Lebih Manusiawi*
- A.M.W. PRANARKA, *Elite En Massa — Suatu Catatan tentang Tulisan Prof. W.F. WERTHEIM*
- S. HARTO, *Kapasitas dan Produktivitas Perguruan Tinggi Kita masih Rendah*
- S. HARTO, *Beberapa Catatan Sekitar Masalah: Kuliah Kerja Nyata*

6. UTARA — SELATAN & TIMUR — BARAT

- N. ARSJAD, *Peranan UNCTAD dan OPEC: Kerjasama atau Konfrontasi?*
- O. Abdul RACHMAN, *Perspektif Sekuriti di Samudra Indonesia*

ANALISA

7. PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

- Soedjono HOEMARDANI, *Peranan Pengawasan dalam Pembangunan*
- Rufinus LAHUR, *Catatan Mengenai "Waktu Pengajuan" Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU—APBN)*

8. NON—ALIGNMENT

- A.R. SUTOPO, *Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Suatu Tinjauan atas Gerakan Non-Blok*

9. NEGARA NON—BLOK DAN MASALAH HABITAT

- N. ARSJAD, *Negara-negara Non-Blok dan Masalah Ekonomi Dunia*
- Onny S. PRIYONO, *Habitat dalam Perspektif Hubungan Manusia*

10. SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL

- Kirdi DIPOYUDO, *Intervensi Suriah dalam Perang Saudara di Libanon*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Perdamaian Rasial di Afrika bagian Selatan*

11. MASALAH DANA INTERNASIONAL & NASIONAL

- N. ARSJAD, *Sidang Tahunan IMF — Bank Dunia 1976*
- J. PANGLAYKIM, *Kelambatan Perkembangan lembaga-lembaga Keuangan Nasional akan Memperbesar Ketergantungan pada Bank-bank Internasional*

12. BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976

- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Daya Fungsional Aparatur Pelaksana Menjelang Tahun 1977*
- Kirdi DIPOYUDO, *Kompetisi Superpower di Benua Afrika*
- A.M.W. PRANARKA, *Situasi Sosial — Budaya Indonesia 1976*

TAHUN VI, 1977

1. BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Komunisme di Negara-negara ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Dunia Arab*
- N. ARSJAD, *Perkembangan Dana Pinjaman Internasional dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia*

2. ASIA TENGGARA: PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA

- Ali MOERTOPO, *Perkembangan di Asia Tenggara dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Strategi dengan Titik Berat Khusus pada Hari Depan ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Asia Tenggara dan Prospeknya: Suatu Tinjauan Umum*
- Parlaungan SIBARANI, *Sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly*
- Bing P. LUKMAN, *Renungan Satu Tahun KTT ASEAN Bali*

3 + 4 BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN

- Rufinus LAHUR, *Organisasi Politik "Hasil Pembaharuan dan Penyederhanaan Kehidupan Politik"*
- F.X. SOEDIJANA, *Hukum Ekonomi*
- Ramzy TAJUDIN, *Strategi Akseptabilitas Sosial Organisasi*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Agropolis: Pembangunan Desa dan Pengembangan Wilayah di Daerah Pedesaan*
- A. Rahman RANGKUTI, *Pengembangan Padi Gogo dalam Peningkatan Produksi Beras*
- Kirdi DIPOYUDO, *Demokrasi Pancasila*

5. KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA — SELATAN

- J. PANGLAYKIM, *Dengan Persetujuan Pemasaran Yang Serba Diatur, Negara-negara Industri Mau Menang Sendiri*
- J. PANGLAYKIM, *Perspektif Pertemuan Puncak London*
- N. ARSJAD, *Kerjasama Ekonomi Internasional Masa Kini dan Masalahnya: Dialog Utara — Selatan*
- J. PANGLAYKIM, *Keuntungan Lebih Besar Yang Dicapai Bank-bank Amerika Karena Bisnisnya Dengan Dunia Ketiga*

6 + 7 BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

- A.R. SUTOPO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam SALT: Mencari Perimbangan Persenjataan Strategis*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara*
- O. ABDULRACHMAN, *Kawasan Timur Tengah Tak Kunjung Damai*
- Bing P. LUKMAN, *Gerakan Euro-Komunisme dan Supremasi Komunis Uni Soviet*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Kawasan Laut Merah*

8. PERKEMBANGAN ASEAN

- Bing P. LUKMAN, *Menjelang Dasawarsa ASEAN: Suatu Tinjauan Kulturil*
- N. ARSJAD, *Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN: Mungkinkah Dicapai?*
- Bing P. LUKMAN, *Indocina Sparing Partner ASEAN*
- Christianto WIBISONO, *Perspektif Kompetisi Indonesia — Vietnam*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Minoritas Muslim di Pilipina Selatan: Prospek Penyelesaian yang Menyeluruh*

9. GENERASI MUDA

- Pande Radja SILALAH, *Generasi Muda dalam Strategi Pembangunan di Masa Depan*
- S. HARTO, *Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan*
- S. HARTO, *Perguruan Tinggi Swasta dalam sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia: Suatu Tinjauan, tentang Masalah Pembinaan dan Pengembangannya.*

10. JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan-perubahan Politik dan Konsep Kerjasama, Keamanan dan Perbatasan Ekonomi Jepang*
- Pande Radja SILALAH, *Pandangan Jepang terhadap ASEAN Berubah?*
- J. PANGLAYKIM, *Doktrin Fukuda: Suatu Pandangan Bisnis*

11. BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI

- Rahman RANGKUTI, *Masalah Peningkatan Produksi Beras*
- F.X. SOEDIJANA, *Kebijaksanaan Perburuan dalam Penanaman Modal Asing*
- N. ARSJAD, *Pasar Uang dan Pasar Modal di Indonesia: Perkembangan, Masalah dan Hambatannya*
- S. HARTO, *Masalah "Kultur Oposisi" dalam Demokrasi Pancasila*

12. BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah Fokus Perhatian Dunia Tahun 1977*
- S. HARTO, *Masalah Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar pada Perguruan Tinggi*
- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977*

TAHUN VII, 1978

1. PERSPEKTIF 1978

- J. PANGLAYKIM, *Indonesia dan Fokus Bisnis Internasional dalam Tahun 1978*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perlombaan Timur-Barat di Kawasan Samudera Hindia*
- N. ARSJAD, *Masalah Krisis Dollar Amerika Serikat dan Pengaruhnya atas Nilai Rupiah*

2. VIETNAM—KAMBOJA, SELAT MALAKA & MASALAH RASIAL

- A.R. SUTOPO, *Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja: Menuju Hegemoni Kawasan?*
- Asnani USMAN, *Kedudukan Selat Malaka Sebagai Perairan Teritorial dan Jalur Pelayaran Internasional ditinjau dari Segi Politik Internasional*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*

3. PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA

- Kirdi DIPOYUDO, *Negara dan Ideologi Negara-Suatu Pengantar*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Suatu Pengantar*
- Christianto WIBISONO, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*

4. DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL
 - Otto ABDULRACHMAN, *Dinamika dalam Hubungan Internasional*
 - James CHACE, *Strategi Pembendungan Baru Amerika*
 - Ali MOERTOPO, *Hubungan Mendatang antara Amerika Serikat Dan Asia Tenggara: Suatu Perspektif Asia Tenggara*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Penyelesaian Damai Masalah Namibia*
5. KEBUDAYAAN DAN PENDIDIKAN
 - Daoed JOESOEF, *Era Pengembangan Kebudayaan dan Kaitannya dengan Pendidikan*
 - Daoed JOESOEF, *Pendidikan, Kebudayaan dan Pembentukan Manusia*
 - Kirdi DIPOYUDO, *Pelembagaan Pola Hidup Sederhana*
 - Onny S. PRIJONO, *Suatu Dilemma untuk Ibu-ibu yang Bekerja*
6. STRATEGI GLOBAL DAN ASIA TENGGARA
 - Jusuf WANANDI, *Segi-segi Politik-Keamanan Asia Tenggara*
 - Hadi SOESASTRO, *Arah Percaturan Politik antara Uni Soviet dan RRC serta Pengaruhnya terhadap Asia Pada Umumnya dan Asia Tenggara pada Khususnya*
 - Jusuf WANANDI, *Situasi Strategis Dunia dan Posisi Amerika Serikat serta Hubungannya dengan Asia Tenggara*
7. BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN NASIONAL
 - Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia — Arti Materiilnya*
 - C.P.F. LUHULIMA, *Tempat-tempat Ilmu Sosial dan Kemanusiaan dalam Pengembangan Sistem Ilmu dan Teknologi Nasional — Suatu Pemikiran*
 - J. PANGLAYKIM, *Wiraswasta [Entrepreneur] dan Perusahaan-perusahaan Pertumbuhan dan Pembangunan Sebagai Faktor Pertumbuhan Ekonomi Nasional*
 - O. Sutomo ROESNADI, *Pengaruh Lingkungan Internasional terhadap Masalah Pembangunan di Dalam Negeri*

MONOGRAF

1. J. PANGLAYKIM BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG
MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS
BANK—BANK SWASTA NASIONAL Rp. 700,—
2. A.M.W. PRANARKA, SITUASI KULTURIL DUNIA
DEWASA INI Rp. 700,—
3. KWIK Kian Gie, KREDIT MACET, DILEMMA
MASA KINI Rp. 700,—
4. Jusuf WANANDI, KEBIJAKAN LUAR NEGERI
PRESIDEN CARTER DAN PERANAN
KONGRES AS Rp. 700,—

Berlangganan ANALISA - Anda berarti memetik keuntungan.

Apabila Anda berminat mendapatkan ANALISA harga tiap eks Rp. 700,- masih ditambah ongkos kirim sekitar 15%. Tapi bila Anda memilih untuk menjadi Pelanggan ANALISA, maka untuk langganan setahun (12 nomor penerbitan) Anda cukup hanya membayar Rp. 8.000,- sudah termasuk ongkos kirim. Istimewa bagi Mahasiswa akan memperoleh potongan khusus 10% untuk langganan setahun (sertakan foto copy Kartu Mahasiswa Anda). Catatkan dari sekarang nama Anda sebagai Pelanggan ANALISA sekaligus mengirim uang langganannya.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan ANALISA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas * : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-

melalui pos wesel atau _____

Mengetahui **

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas

Kirimkan Formulir ini kepada :

Centre for Strategic and International Studies

up. Biro Publikasi, Jl. Tanah Abang III/27 Jakarta Pusat, Telp. 356532-5

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di

MEDAN : TB Deli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Pancaran Ilmu, TB Pustaka Angrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ichtiar, TB Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung. TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB Tintamas; TB Djambatan; TB Kinta; TB Marco; TB Pradjanaparamita, Bursa Buku Fak. Ekonomi UI; TB Jayakarta, TB Pelita; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karya Nusantara, TB Djawa; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah Mada; JOGYAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pembangunan; MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG: TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNG Pandang: TB Bhakti Baru, Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung; DENPASAR: TB Sumber Agung



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 700,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 8.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 7.200,—



RINGKASAN PERISTIWA

majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri (politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam) dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan surat kabar, buletin serta majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS. Harga per eks Rp. 350,—, langganan setahun (24 nomor) Rp. 10.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 9.000,—



THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—. Jilidan Vol. I, II, III, V a Rp. 4.000,—, Vol IV Rp. 3.000,—



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain



CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada: Biro Publikasi — CSIS

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489